

**PERAN KOMITE MADRASAH DALAM PENGEMBANGAN
MADRASAH TSANAWIYAH DARUL ULUM BAURENO BOJONEGORO
(Studi Kasus Madrasah Tsanawiyah Darul Ulum Baureno bojonegoro)**

SKRIPSI

**Oleh:
Miftahul Arief Rahman
08110217**



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
April, 2012**

**PERAN KOMITE MADRASAH DALAM PENGEMBANGAN
MADRASAH TSANAWIYAH DARUL ULUM BAURENO BOJONEGORO
(Studi Kasus Madrasah Tsanawiyah Darul Ulum Baureno bojonegoro)**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana
Malik Ibrahim (MALIKI) Malang Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Strata Satu Sarjana Pendidikan (S.Pd. I)*

**Oleh:
Miftahul Arief Rahman
08110217**



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
April, 2012**

LEMBAR PERSETUJUAN
PERAN KOMITE MADRASAH DALAM PENGEMBANGAN
MADRASAH TSANAWIYAH DARUL ULUM BAURENO BOJONEGORO
(Studi Kasus Madrasah Tsanawiyah Darul Ulum Baureno bojonegoro)

SKRIPSI

Oleh:

Miftahul Arief Rahman

08110217

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing,

Dr. H. M. Mujab, M.A

NIP. 196611212002121000

Tanggal, 27 Maret 2012

Mengetahui,

Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam

Dr. Moh. Padil, M. Pd. I

NIP. 196512051994031003

LEMBAR PENGESAHAN
PERAN KOMITE MADRASAH DALAM PENGEMBANGAN
MADRASAH TSANAWIYAH DARUL ULUM BAURENO BOJONEGORO
(Studi Kasus Madrasah Tsanawiyah Darul Ulum Baureno bojonegoro)
SKRIPSI

Dipersiapkan dan disusun oleh
Miftahul Arief Rahman (08110217)

Telah dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal
04 April 2012 dengan nilai B+
dan telah dinyatakan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar strata satu Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd. I) pada tanggal: 05 Mei 2012

Panitia Ujian

Tanda Tangan

Ketua Sidang,

Dr. H. Farid Hasyim, M. Ag

NIP. 195203091983031002

: _____

Sekretaris Sidang,

Drs. A. Zuhdi, MA

NIP. 196902111995031002

: _____

Pembimbing,

Dr. H. M. Mujab, MA

NIP. 196611212002121000

: _____

Penguji Utama,

Dr. H. Farid Hasyim, M. Ag

NIP. 195203091983031002

: _____

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Tarbiyah
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang

Dr. H. M. Zainuddin, MA
NIP. 19620507 199503 1 001

PERSEMBAHAN

Teriring Rasa Syukur Atas Segala Rahmat Dan Inayah

Allah Serta Syafa'at Rasul-Nya,

Kuberikan Karya Terbaikku Ini Sebagai

Bingkisan Terindah Untuk kedua orang tuaku

Bapak: Abd. Rochim, Dan Ibu: Eva Rufiatin

Yang Telah Memberikan Kasih Sayang, Doa, Dan Segalanya

Yang Tak Mungkin Terbalaskan Baik Moril, Materiil Dan Spiritual,

Juga Untuk Adik-adikku, Amila Nadiyah, Desta Ayu U.Q,

Amanda Prima Ilma Nafi'ah Dan Rahman Falahuddin,

Terima Kasih Banyak Atas Segala Doa Dan Dukungannya,

Dan Tidak Terlupakan Semua Guru-Guruku

Dan Dosen-Dosenku Yang Telah Mendidik Dan Memberikan

Ilmunya Dengan Penuh Ikhlas,

Serta Buat Semua Sahabatq Dan Teman-Temanku Canda

Tawamu Adalah Penyegaran Fikiranku

Dan Semua Pihak Yang Tidak Bisa Aku Cantumkan Masing-Masing

Terima Kasih Atas Semua Yang Kalian Berikan.

MOTTO

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَعَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ
الْإِسْلَامَ دِينًا.

“Pada hari ini telah Ku-sempurnakan untuk kamu agamamu dan telah Ku-cukupkan bagimu nikmat-Ku dan telah Ku-Ridhai Islam itu sebagai agamamu.” (QS. Al-Maidah: 3)¹

¹ Anggota IKAPI Jawa Barat, 2005, Al-Quran dan Terjemahnya, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro

Dr. H. M. Mujab, M.A

Dosen Fakultas Tarbiyah

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi Miftahul Arief Rahman

Malang, 09 April 2012

Lamp. : 6 (enam) Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim

Malang

Di

Malang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sesudah melakukan beberapa kali bimbingan, baik dari segi isi, bahasa, maupun tehnik penulisan, dan setelah membaca skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Miftahul Arief Rahman

NIM : 08110217

Jurusan : Pendidikan Agama Islam

Judul Skripsi : *Peran Komite Madrasah Dalam Pengembangan Madrasah
Tsanawiyah Darul Ulum Baureno Bojonegoro*

maka selaku Pembimbing, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk diujikan.

Demikian, mohon dimaklumi adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing,

Dr. H. M. Mujab, M.A

NIP. 196611212002121000

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan, bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang sama dengan karya ilmiah lainya dan yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Malang, 09 April 2012

Miftahul Arief Rahman
NIM. 08110217

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah penulis ucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmad, hidayah, dan taufiq-Nya, sehingga karya yang sederhana ini dapat terselesaikan dengan baik dan benar.

Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada sang pendidik sejati Rasulullah SAW, Serta para sahabat, tabi'in, dan para umat yang senantiasa berjalan dalam risalah-nya. Atas berkat rahmat dan inayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERAN KOMITE MADRASAH DALAM PENGEMBANGAN MADRASAH TSANAWIYAH DARUL ULUM BAURENO BOJONEGORO (Studi Kasus di Madrasah Tsanawiyah Darul Ulum Baureno Bojonegoro)”**. Tak lupa ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis haturkan khususnya kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda yang telah mengandung, mengasuh, membimbing, mendidik, mengarahkan, dan dengan pengorbanan serta do'a restunya yang selalu menyertai saya sehingga saya bisa menyelesaikan Proposal dengan lancar.
2. Bapak Prof. DR. H. Imam Suprayogo, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan fasilitas dan pelayanan pendidikan selama penulis menuntut ilmu pengetahuan di lembaga ini.
3. Bapak Dr. H. M. Zainuddin, MA selaku Dekan Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan motivasi dan dorongan kepada penulis.
4. Bapak Dr. Padil, M. Pd. I, selaku Ketua Jurusan Pendidikan Islam Fakultas tarbiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan Proposal ini.

5. Bapak Dr. H. M. Mujab, M.A selaku Dosen Wali yang penuh perhatian, kedisiplinan dan kesabaran dalam bimbingan serta arahan dalam penulisan Proposal ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan ilmu dan memberi bimbingan kepada penulis selama belajar di lembaga ini.
7. Bapak Drs. Juki, M. Pd selaku Kepala Madrasah MTs Darul Ulum Baureno Bojonegoro beserta dewan guru dan para siswa MTs Darul Ulum Baureno Bojonegoro.
8. Semua pihak (teman, dan saudara seperjuangan) yang memberikan bantuan berupa pemikiran maupun motivasi kepada penulis untuk terselesaikannya Skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang telah penulis susun masih jauh dari kesempurnaan, maka saran serta kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi sempurnanya karya tulis ini. Semoga proposal ini menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi semua pihak, bagi penulis untuk pengembangan kemampuan lebih lanjut dan bagi kemajuan ilmu pengetahuan serta kemajuan kehidupan sosial dan keagamaan ditengah arus globalisasi.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Malang, 09 April 2012

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN NOTA DINAS	vii
HALAMAN PERNYATAAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Penelitian Terdahulu	8
F. Batasan Masalah	10
G. Definisi Operasional	11

H. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KAJIAN TEORI	15
A. Komite Madrasah	15
1. Sejarah Komite Sekolah/ Madrasah	15
2. Pengertian Komite Sekolah/ Madrasah	16
3. Dasar Hukum	18
4. Kedudukan dan Sifat Komite Madrasah	19
5. Tujuan Komite Madrasah.....	21
6. Peran dan Fungsi Komite	30
7. Keanggotaan Komite Madrasah	31
8. Kepengurusan Komite Madrasah	32
9. Pembentukan Komite Madrasah	33
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Metode dan Jenis Penelitian	35
B. Kehadiran Peneliti	41
C. Lokasi Penelitian	42
D. Sumber Data	43
E. Teknik Pengumpulan Data	45
F. Analisis Data	51
BAB IV HASIL PENELITIAN	54
A. Keadaan MTs Darul Ulum	54
1. Sejarah Singkat Berdirinya	54
2. Visi, Misi MTs Darul Ulum Baureno Bojonegoro.....	56

3. Letak Geografis	57
4. Keadaan Guru dan Karyawan	58
5. Keadaan Siswa	59
6. Sarana dan Prasarana	60
7. Struktur Organisasi	61
8. Fungsi dan Tugas Pengelola Madrasah	61
9. Program Kerja Madrasah	61
B. Komite Madrasah.....	62
1. Sejarah Komite Madrasah	62
2. Struktur Organisasi komite Madrasah	63
3. Tujuan Dibentuknya Komite Madrasah	63
4. Tugas Dan Fungsi Komite Madrasah	64
5. Keuangan Komite Madrasah	65
C. Peran Komite Madrasah Dalam Pengembangan Madrasah	65
1. Peran Komite Madrasah Sebagai Pemberi Pertimbangan	65
2. Peran Komite Madrasah Sebagai Pendukung	67
3. Peran Komite Madrasah Sebagai Pengontrol	68
4. Peran Komite Madrasah Sebagai Mediator Antara Pemerintah Dengan Masyarakat Di Madrasah	69
5. Peran Serta Masyarakat	70
D. Kendala Yang Dihadapi Komite Madrasah	71

BAB V PEMBAHASAN	75
A. Program Kerja Komite Sekolah Dengan Masyarakat Dalam Meningkatkan Mutu Madrasah Tsanawiyah Darul Ulum Baureno Bojonegoro	78
B. Bagaimana Strategi Komite Sekolah Dengan Masyarakat Untuk Meningkatkan Mutu Madrasah Tsanawiyah Darul Ulum Baureno Bojonegoro	79
C. Implementasi Dan Peran Masyarakat Dan Sekolah Selama Ini.....	93
BAB VI PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

TABEL I : TENTANG INDIKATOR KINERJA KOMITE SEKOLAH/ MADRASAH	23
TABEL II : TENTANG DATA GURU MTS DARUL ULUM BAURENO BOJONEGORO	58
TABEL III : TENTANG SISWA MTS DARUL ULUM BAURENO BOJONEGORO	59
TABEL IV : SARANA DAN PRASARANA	60

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Rekomendasi Penelitian dari Fakultas

Lampiran 2 : Bukti Konsultasi Dosen Pembimbing

Lampiran 3 : Pedoman Wawancara

Lampiran 4 : Struktur Organisasi MTs Darul Ulum Baureno Bojonegoro

Lampiran 5 : Struktur Kepengurusan Komite Madrasah MTs Darul Ulum
Baureno Bojonegoro

Lampiran 6 : Program Kerja Komite Madrasah MTs Darul Ulum Baureno
Bojonegoro

Lampiran 7 : Foto-Foto Dokumentasi di MTs Darul Ulum Baureno Bojonegoro

Lampiran 8 : AD/ART Komite Madrasah MTs Darul Ulum Baureno Bojonegoro

Lampiran 9 : Denah Ruangan MTs Darul Ulum Baureno Bojonegoro

Lampiran 10 : Biodata Penulis (Riwayat Hidup)

ABSTRAK

Rahman, Miftahul Arief. 2012. *Peran Komite Madrasah Dalam Pengembangan Madrasah Tsanawiyah Darul Ulum Baureno Bojonegoro*. Skripsi, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dr. H. M. Mujab, M.A

Kata Kunci: *Peran, Komite Madrasah, Pengembangan, Madrasah Tsanawiyah*

Adanya otonomi pendidikan merupakan salah satu bentuk dari bagian pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, untuk itu diperlukan suatu wadah yang dapat mengakomodasikan pandangan, aspirasi dan menggali potensi masyarakat untuk menjamin terciptanya demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas pendidikan. Salah satu wadah tersebut adalah dewan pendidikan di tingkat kabupaten/kota dan komite sekolah/Madrasah di tingkat satuan pendidikan. Hal itu mengacu kepada undang-undang nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) tahun 2000-2004, dan sebagai implementasi dari undang-undang tersebut, telah diterbitkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang dewan pendidikan dan komite sekolah.

MTS Darul Ulum sebagai salah satu Madrasah yang berada di bawah naungan Departemen Agama, juga melaksanakan amanat undang-undang dengan membentuk komite Madrasah di dalam satuan pendidikannya. Komite Madrasah diharapkan dapat membantu meningkatkan proses belajar mengajar dan mutu pendidikan dengan menjalankan peran dan fungsinya. Hal inilah yang membuat penulis tergerak untuk melakukan penelitian tentang peran komite Madrasah dalam meningkatkan proses belajar mengajar dan mutu pendidikan di MTS Darul Ulum. Tujuan dibentuknya Komite Madrasah adalah untuk mewedahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan, meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan serta menciptakan kondisi dan suasana transparansi, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di Madrasah.

Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk mendeskripsikan : apa peran Komite Madrasah dalam pengembangan Madrasah di Madrasah Tsanawiyah Darul Ulum Baureno Bojonegoro, Strategi Komite Madrasah untuk meningkatkan mutu Madrasah Tsanawiyah Darul Ulum Baureno Bojonegoro, serta Implementasi program kerja Komite Madrasah selama ini untuk meningkatkan mutu Madrasah Tsanawiyah Darul Ulum Baureno Bojonegoro. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian studi kasus, serta dalam mengumpulkan data menggunakan, observasi, interview (wawancara), dan dokumentasi. Sumber data: Kepala Mts Darul Ulum Baureno Bojonegoro, pengurus Komite Madrasah Tsanawiyah Darul Ulum Baureno Bojonegoro, guru-guru, dan orang tua siswa, data yang diperoleh selanjutnya dianalisis Untuk menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu

mendeskripsikan data-data yang ada untuk menggambarkan realitas sesuai dengan fenomena yang sebenarnya.

Penelitian ini berfokus pada: (1) Program kerja komite Madrasah dalam pengembangan Madrasah di MTS Darul Ulum baureno bojonegoro (2) Strategi komite Madrasah dalam pengembangan Madrasah Tsanawiyah Darul Ulum Baureno Bojonegoro (3) Implementasi program kerja Komite Madrasah selama ini untuk mengembangkan Madrasah Tsanawiyah Darul ulum Baureno Bojonegoro.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Komite Madrasah MTS Darul Ulum telah menjalankan 4 peran dan 7 fungsinya serta melaksanakan: (1) pengawasan dan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan program (2) Ikut serta dalam penentuan dan pembuatan seluruh program pendidikan, (3) Mengadakan rapat evaluasi pelaksanaan program pada akhir tahun, (4) Menjal in kerjasama dengan institusi pemerintah (Depag), tokoh masyarakat dan akademisi pendidikan, (5) Membantu Madrasah dalam pencarian dana untuk pembangunan, perlengkapan sarana prasarana dan beasiswa guru/siswa. Faktor penghambat implementasi program komite di MTS Darul Ulum diantaranya: (1) Ketidakmerataan kualitas SDM yang dimiliki oleh pegawai dan guru dalam pengajaran, (2) Kurang maksimalnya kontribusi yang diberikan oleh anggota komite karena kesibukan profesi lainnya, (3) kurangnya antusias dan partisipasi guru dan pegawai dalam mengikuti program yang diadakan (4) kurang intensifnya realisasi dan sosialisasi program. Sedangkan upaya pihak komite dan Madrasah untuk mengatasi hambatan tersebut dengan cara: (1) selalu mengadakan kontak dan komunikasi antara anggota dan pengurus komite, (2) menambah jadwal pelatihan, seminar, workshop, dan study banding untuk meningkatkan wawasan dan SDM, (3) membentuk beberapa bidang dalam komite dan jadwal piket anggota komite, agar lebih fokus dan selalu dapat memonitoring pelaksanaan program dan perkembangan Madrasah.

ABSTRACT

Rahman, Miftahul Arief. Of 2012. Committee role in the development of junior secondary school School Darul Ulum Baureno Bojonegoro. Thesis, Department of Islamic Education, Faculty of Tarbiyah, State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dr. H. M. Mujab, MA

Keywords: Fun, School Committee, Development, Islamic junior high

Autonomy of education is one form of the implementation of regional autonomy in order to improve the quality of education, it is necessary for a container that can accommodate the views, aspirations and explore the potential of communities to ensure the creation of democratization, transparency, and accountability in education. One body is the board of education at the district / town and school committees / School education at the unit level. It refers to Law No. 25 of 2000 on National Development Program (Propenas) 2000-2004, and as the implementation of the law, has issued Decree No. 044/U/2002 Minister of National Education dated 2 April 2002 on board education and school committees.

MTS Darul Ulum School as one who is under the auspices of the Ministry of Religious Affairs, as well as carrying out the mandate to form a committee undangundang in units of madrassa education. School committee is expected to help enhance the learning process and the quality of education with their functions and roles. This is what makes the author moved to do research on the role of Islamic committees in improving the learning process and the quality of education at Darul Ulum MTS. School is the main aim of the Committee to contain and convey the aspirations and community initiatives in policy and operational delivery of education programs, increase accountability and community participation in providing education and menciptan conditions and atmosphere of transparency, accountability, and democratic in the administration and quality education services in School.

The purpose of this discussion is to describe: what role in the development of School Committee at the School Darul Ulum Islamic junior high Baureno Bojonegoro, the Strategy Committee to improve the quality of School Darul Ulum Islamic junior high Baureno Bojonegoro, as well as the implementation of School program of work for this committee to improve the quality of junior secondary school Darul Ulum Baureno Bojonegoro. This study uses qualitative methods and types of case study research, as well as in collecting data using, observation, interview (interview), and documentation. Source of data: Head of Darul Ulum Baureno Bojonegoro Mts, the management committee School Darul Ulum Tsanawiyah Baureno Bojonegoro, teachers, and parents of students, the data obtained were then analyzed to analyze the data, the authors used a qualitative descriptive analysis techniques, which describes the data available to describe reality in accordance with the actual phenomena.

This study focuses on: (1) School committee work program in the development of Darul Ulum madrassa in baureno Bojonegoro MTS (2) Strategy

Committee in the development of junior secondary school madrassa Darul Ulum Baureno Bojonegoro (3) The implementation of School program of work for this committee to develop the School Darul Tsanawiyah ulum Baureno Bojonegoro.

These results indicate that MTS School Darul Ulum Committee has been running 4 and 7 functions as well as the role of carrying out: (1) supervision and monitoring of the entire implementation of the program (2) Participate in the determination and making the entire educational program, (3) Hold the conduct of the evaluation meeting program at the end of the year, (4) Establish cooperation with government institutions (MORA), community leaders and academics of education, (5) Assisting School seeking funding for the construction, infrastructure equipment and Scholarships teacher / student. Factors inhibiting the implementation of the program committee at Darul Ulum MTS include: (1) the quality of human inequality which is owned by employees and teachers in teaching, (2) Less maximum contributions made by members of the committee due to other professional activity, (3) the lack of enthusiasm and participation of teachers and employees in the program held (4) is less intense realization and socialization program. While the efforts of the committee and School to overcome these obstacles by: (1) is always in contact and communication between members and management committee, (2) increase the training schedule, seminars, workshops, and case study to improve the knowledge and human resources, (3) establish some areas of the committee and committee members picket schedule, to be more focused and always be able to monitor program implementation and development of the School.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ditinjau dari sudut hukum, definisi pendidikan berdasarkan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, pasal 1 ayat (1), yaitu “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana unntuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. ” sedangkan peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan” (Pasal 1 ayat (4). Potensi otak manusia yang digunakan untuk berpikir baru 4%. Jadi, masih 96% dari otak kita belum digunakan untuk berpikir (Sunario, 2003).¹

Kata-kata pendidikan, pengajaran, belajar, pembelajaran, bimbingan dan pelatihan sebagai istilah-istilah teknis yang kegiatannya lebur dalam aktivitas pendidikan. Pendidikan sebagai aktivitas berarti upaya yang secara sadar dirancang untuk membantu seseorang atau sekelompok orang dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, pandangan hidup, sikap hidup, dan keterampilan hidup baik yang bersifat manual individual maupun sosial.

¹ Husaini Usman, *Manajemen: teori, praktik, dan riset pendidikan* ,Jakarta:Sinar Grafika Offset, 2008, hlm 9

Istilah “*education*” dalam bahasa Inggris yang berasal dari bahasa Latin yaitu “*educere*” yang berarti memasukan sesuatu. Pendidikan sebagai fenomena adalah peristiwa perjumpaan dua orang atau lebih yang dampaknya ialah berkembangnya suatu pandangan hidup, sikap hidup, atau keterampilan hidup pada salah satu atau beberapa pihak.²

Oleh karena itu, masalah pendidikan merupakan masalah yang tidak henti-hentinya untuk dibahas serta merupakan masalah yang tidak ringan sehingga berbagai upaya dan strategi telah dilakukan demi kemajuan dan keberhasilan dalam pendidikan.

Peningkatan mutu pendidikan merupakan sasaran pembangunan di bidang pendidikan nasional dan merupakan bagian integral dari upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia secara menyeluruh. Pemerintah, dalam hal ini Menteri Pendidikan Nasional telah mencanangkan “Gerakan Peningkatan Mutu Pendidikan” pada tanggal 2 Mei 2002; dan lebih terfokus lagi, setelah diamanatkan dalam Undang-Undang Sisdiknas (2003) bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk “... mencerdaskan kehidupan bangsa.”

Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi tanggung jawab pendidikan, terutama dalam mempersiapkan peserta didik menjadi subyek yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, tangguh, kreatif, mandiri, demokratis, dan profesional pada bidangnya masing-masing.

² DR. H. Syaiful Sagala, *Administrasi pendidikan kontemporer*, (Bandung: Alfabeta cv, 2008), hlm1.

Menyadari hal tersebut, pemerintah telah melakukan penyempurnaan system pendidikan yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah, serta diikuti oleh penyempurnaan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, yang secara langsung berpengaruh terhadap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pendidikan. Jika sebelumnya manajemen pendidikan merupakan wewenang pusat dengan paradigma top-down atau sentralistik, maka dengan berlakunya undang-undang tersebut kewenangan bergeser pada pemerintah daerah kota dan kabupaten dalam wujud pemberdayaan sekolah.³

Untuk kepentingan itulah, diperlukan paradigma baru manajemen pendidikan. Dalam hal ini, berbagai pihak menganalisis dan melihat perlunya diterapkan manajemen berbasis sekolah yang memberikan otonomi luas pada sekolah dan pelibatan masyarakat dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional.

Sebagai salah satu aspek penting dalam manajemen berbasis sekolah, partisipasi masyarakat dan orang tua peserta didik sangat diperlukan dalam pembuatan berbagai keputusan. Dengan demikian masyarakat dapat lebih memahami serta mengawasi dan membantu sekolah dalam pengelolaan termasuk kegiatan pembelajaran. Akan tetapi pada kenyataan sekolah dewasa ini, partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelaksanaan program sekolah masih relatif rendah dan pada umumnya masih belum begitu menyadari bahwa tugas dan tanggung jawab pendidikan anak-anak adalah

³ E. Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003), 31.

juga tugas dan tanggung jawab masyarakat disamping sekolah dan pemerintah. Seperti yang pernah dikemukakan oleh mantan menteri P dan K Mashuri, S.H sebagai berikut: ⁴

“Sekolah itu hendaknya merupakan bagian integral dari masyarakat sekitarnya. Sesuai dengan azas pendidikan seumur hidup, sekolah itu hendaknya mempunyai dwi fungsi: mampu memberikan pendidikan formal dan juga pendidikan non formal, baik untuk para pemuda maupun untuk orang dewasa pria wanita”.

Hubungan masyarakat dan lembaga pendidikan merupakan sarana yang sangat berperan dalam membina serta mengembangkan pertumbuhan pribadi peserta didik di sekolah. Masyarakat dan lembaga pendidikan memiliki hubungan yang sangat erat dalam mencapai tujuan atau pendidikan secara efektif dan efisien. Sebaliknya lembaga pendidikan juga harus menunjang pencapaian tujuan atau pemenuhan kebutuhan masyarakat, khususnya kebutuhan pendidikan.

Pengaruh masyarakat terhadap lembaga pendidikan terasa amat kuat dan berpengaruh pula kepada para individu yang ada dalam lingkungan lembaga pendidikan. Oleh sebab itu sangat perlu dipertimbangkan, dalam memperbaiki dan mempertinggi hubungan kerjasama antara masyarakat dan lembaga pendidikan yaitu dengan melibatkan orang tua, dan masyarakat serta isu- isu yang timbul dan bagaimana menyelesaikan isu- isu tersebut.⁵

⁴ Ngalim Purwanto, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), 193.

⁵ Wahjosumidjo, *Kepemimpinan Kepala Sekolah*, (Jakarta: Remaja Grafindo Persada,

Menurut Edwar I. Bernays seorang pelopor humas di Amerika Serikat dalam bukunya *Public Relation* (1952) yang dikutip oleh Hamdan Adnan, Hafid Cengara mengatakan 3 aspek hubungan masyarakat yaitu memberi informasi kepada masyarakat, mengajak masyarakat untuk mengubah sikap dan perilaku mereka dan memerlukan usaha-usaha untuk menyatukan sikap dan tindakan satu lembaga atau organisasi dengan publiknya, atau sebaliknya dalam kamus terkenal “Webster International Dictionary” dijelaskan bahwa praktek hubungan masyarakat untuk promosi, membina hubungan baik antara kelompok individu dengan public tertentu atau masyarakat umum melalui penyebaran informasi yang mudah dipahami, saling pengertian dan hubungan baik yang dicapai antara individu, organisasi, instansi dengan publik mereka, menggunakan metode untuk mencapai hubungan yang baik, ilmu pengetahuan untuk menjalin hubungan baik dan saling menguntungkan tenaga terampil untuk melaksanakan pekerjaan.⁶

Sementara itu, Sanafiah Faisal mengemukakan bahwa hubungan antar sekolah (pendidikan) dengan masyarakat paling tidak, bisa dilihat dari dua segi, yaitu:⁷

1. Sekolah sebagai partner masyarakat didalam melaksanakan fungsi pendidikan. Dalam konteks ini, berarti keduanya yaitu sekolah dan

1999), 331.

⁶ Hamdan Adnan, Hafid Cengara, *Prinsip-Prinsip Hubungan Masyarakat*, (Surabaya: Usaha Nasional. 1996), 15.

⁷ Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 96.

masyarakat dilihat sebagai pusat-pusat pendidikan yang potensial, dan mempunyai hubungan yang fungsional.

2. Sekolah sebagai prosedur yang melayani pesan-pesan pendidikan dari masyarakat lingkungannya. Berdasarkan hal ini, berarti antara masyarakat dengan sekolah memiliki ikatan hubungan rasional berdasarkan kepentingan di kedua belah pihak.

Dengan mengadakan kontak hubungan dengan masyarakat akan memudahkan lembaga pendidikan itu menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi lingkungannya. Lembaga pendidikan lebih mudah menempatkan dirinya di masyarakat dalam arti dapat diterima sebagai bagian dari milik warga masyarakat. Lembaga pendidikan dapat mengikuti arus dinamika masyarakat lingkungannya.⁸

Madrasah Tsanawiyah Darul Ulum Baureno merupakan lembaga pendidikan yang berdiri atas usaha dan perjuangan komite madrasah dengan masyarakat sekitar sehingga tidak salah jika antara keduanya memiliki jalinan yang baik. Jalinan tersebut bukan hanya terbatas pada pemberian bantuan finansial untuk mendukung kegiatan operasional sekolah akan tetapi masyarakat dan orang tua peserta didik juga dilibatkan secara langsung dalam merencanakan dan mengembangkan program-program pendidikan.

Meskipun Madrasah Tsanawiyah Darul Ulum Baureno ini terbilang sekolah swasta, kualitas dan prestasinya tidak kalah dengan sekolah-sekolah lain yang negeri. Dengan melihat betapa pentingnya aspek hubungan

⁸ Made Pidarta, *Manajemen Pendidikan Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1988), 193.

masyarakat dengan sekolah yang nantinya diharapkan dapat mewujudkan sekolah yang bermutu, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian di sekolah tersebut agar dapat menemukan dan mengungkapkan bagaimana pelaksanaan hubungan masyarakat sebagai strategi dalam meningkatkan mutu lembaga pendidikan.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Sepanjang dari yang penulis ketahui belum ada penelitian mengenai hal tersebut di Madrasah Tsanawiyah Darul Ulum Baureno. Oleh karena itu, berangkat dari latar belakang yang telah dirumuskan diatas, penulis dapat merumuskan rumusan masalah penelitian yaitu:

1. Apa saja program kerja komite sekolah dengan masyarakat dalam meningkatkan mutu Madrasah Tsanawiyah Darul Ulum Baureno?
2. Bagaimana strategi komite sekolah dengan masyarakat untuk meningkatkan mutu Madrasah Tsanawiyah Darul Ulum Baureno?
3. Bagaimana implementasi program kerja komite madrasah dan peran masyarakat selama ini?

C. Tujuan Penelitian

Dalam hal ini, tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah:

1. untuk mengetahui apa saja program kerja komite madrasah sebagai strategi untuk meningkatkan mutu Madrasah Tsanawiyah Darul Ulum Baureno.
2. untuk mengetahui strategi komite madrasah untuk meningkatkan mutu Madrasah Tsanawiyah Darul Ulum Baureno.

3. untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana implementasi dan peran komite madrasah sebagai strategi untuk meningkatkan mutu Madrasah Tsanawiyah Darul Ulum Baureno.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang hasilnya dituangkan dalam bentuk karya ilmiah tentunya mempunyai manfaat. Hasil penelitian ini sekurang-kurangnya mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Bagi ilmu pengetahuan

Hasil penelitian ini dapat menambah beberapa hasil penelitian yang telah ada, sebagai perbendaharaan perpustakaan Uin Maliki Malang serta diharapkan dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut bagi peneliti lain dalam bidang manajemen pendidikan.

2. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan dan pengalaman khususnya dibidang manajemen pendidikan dengan cara membandingkan teori yang didapat dengan keadaan yang sebenarnya terjadi.

3. Bagi Madrasah Tsanawiyah Darul Ulum Baureno

Diharapkan dapat bermanfaat bagi pemikiran para tenaga kependidikan di Madrasah Tsanawiyah Darul Ulum Baureno pada khususnya dan masyarakat/orang tua peserta didik pada umumnya agar dapat terus bekerja sama meningkatkan mutu lembaga pendidikan.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang Komite madrasah memang telah banyak dilakukan di sekolah-sekolah maju, dengan atas nama Komite Sekolah baik dalam skala penulisan skripsi atau tesis, diantaranya yaitu:

1. Penelitian oleh Sukron pada tahun (Tesis, 2005) dengan judul “Peran Komite Sekolah dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah (MBS) di MTsN 02 Semarang”. Penelitian ini lebih fokus terhadap peran Komite Sekolah dalam pelaksanaan MBS dan hasil penelitiannya adalah bahwa Komite Sekolah merupakan salah satu penunjang terlaksananya MBS di masing-masing Satuan Pendidikan.
2. Penelitian oleh Arif zunaidi(skripsi, 2008) dengan judul “ Peranan Komite Sekolah Dalam pembelajaran PAI di SMP Islam Ngebruk, Sumberpucung, Malang Pada Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)”. Penelitian ini lebih terfokus pada peran Komite Sekolah terhadap pembelajaran PAI. Dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa peran komite di SMP Islam Ngebruk dalam menunjang dan mengawasi pembelajaran PAI sudah cukup baik pada pelaksanaan program manajemen berbasis sekolah (MBS). Beberapa peran yang dilakukan meliputi pengembangan kurikulum PAI, ekstrakurikuler berbasis islam, muatan lokal dan kegiatan keagamaan.
3. Penelitian oleh Haris Bahtiar (Skripsi, 2009) dengan judul “Peran Komite Sekolah dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di SMP Islam Jabung Malang”. Dari hasil penelitian ini lebih difokuskan pada peran komite dalam pengembangan kurikulum yang mana pada mata pealajaran

PAI, dari hasil penelitian di SMP Islam Jabung, telah ditemukan bahwa komite mempunyai peran yang cukup baik, diantaranya dalam pengembangan kurikulum muatan lokal pendidikan Agama Islam seperti pembaca BTA, istighosah, sholat jama'ah dan pembacaan shalawat anwar.

Adapun penelitian yang dilakukan di MTs Darul Ulum Baureno Bojonegoro sebelumnya sudah ada mengenai penelitian pendidikan, diantaranya seperti strategi pengembangan madrasah, pelaksanaan MBS, kepemimpinan di MTs Darul Ulum Baureno Bojonegoro dan masih banyak lainnya. Namun yang membahas mengenai peran komite dalam pengembangan madrasah tsanawiyah Darul Ulum Baureno bojonegoro belum ada, hal itu yang memotivasi penulis untuk melakukan penelitian tentang peran komite di MTs Darul Ulum Baureno Bojonegoro yang dikaitkan dengan proses belajar dan mutu pendidikan.

F. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Untuk lebih memfokuskan pembahasan ini dan agar pembahasannya tidak terlalu meluas maka ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peran Komite Madrasah sebagai:
 - a. Pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan Madrasah.
 - b. Pendukung baik yang berwujud financial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di Madrasah.

- c. Pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di Madrasah.
 - d. Mediator antara pemerintahan (eksekutif) dengan masyarakat di Madrasah.
2. Program kerja komite sekolah dengan masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan Madrasah Tsanawiyah Darul Ulum Baureno Bojonegoro sedangkan bidang yang lain hanya sebagai pendukung..
 3. Strategi Komite Madrasah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah Tsanawiyah Darul Ulum Baureno Bojonegoro.
 4. Implementasi peran dan fungsi komite sekolah dengan masyarakat dalam proses pengembangan mutu pendidikan Madrasah Tsanawiyah Darul Ulum Baureno Bojonegoro.
 5. Lokasi penelitian terbatas hanya pada Madrasah Tsanawiyah Darul Ulum Baureno Bojonegoro sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasikan pada sekolah lain yang berbeda jenis maupun jenjang pendidikan.
 6. Dilihat dari segi waktu dan data yang diperoleh merupakan pencerminan dari keadaan pada saat penelitian dilangsungkan, sehingga apabila penelitian ini dilaksanakan pada waktu yang lain, maka terdapat kemungkinan bahwa hasilnya akan berbeda pula sesuai dengan perkembangan.

G. Definisi Operasional

Definisi Operasional digunakan untuk persamaan persepsi istilah antara peneliti dan pembaca. Hal tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap konsep-konsep yang disampaikan, sehingga penting sekali untuk mendefinisikan istilah-istilah yang digunakan peneliti. Oleh karena itu, dalam penelitian ini istilah-istilah yang ada pada variabel judul didefinisikan sebagai berikut:

1. Peran adalah tugas yang harus dijalankan sesuai dengan apa yang diperankan oleh sesuatu dengan mengikuti atau meniru yang ada dalam diri yang diperankan atau ditiru.
2. Komite Madrasah adalah badan mandiri yang mewadahi peranserta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah.
3. Pengembangan Madrasah adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral sesuai dengan kebutuhan melalui pendidikan dan latihan atau proses untuk memajukan madrasah menjadi lebih baik, pengembangan ini mencakup: Kesiswaan, Tenaga Kependidikan, Program Kependidikan dan Kurikulum, Pendanaan dan Keuangan, Sarana dan Prasarana, serta hubungan madrasah dengan masyarakat.

Madrasah Tsanawiyah adalah suatu lembaga pendidikan yang sejajar dengan SLTP yang berada dibawah naungan Departemen Agama serta dalam pembelajarannya lebih menekankan pada pendidikan yang syarat dengan nuansa islami.

H. Sistematika Pembahasan

BAB I, dalam bab ini memberikan uraian mengenai: latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II, dalam bab ini mengkaji beberapa teori yang berkenaan dengan fokus penelitian didalamnya dikaji diantara lain: membahas tentang Komite Madrasah, Sejarah Madrasah, Peran Komite Madrasah dalam pengembangan Madrasah.

BAB III, dalam bab ini akan dibahas pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan pengecekan keabsahan data. Dimana peneliti untuk mendapatkan langsung data berdasarkan dari obyek yang akan diteliti dengan cara melakukan observasi langsung kelokasi, mengadakan interview, dokumentasi, pengumpulan data, analisis data dan pelaporan penelitian.

BAB IV, dalam bab ini terdiri dari diskripsi obyek penelitian dan paparan data penelitian yang diambil dari realita-realita objek yang berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan merupakan ulasan kajian teori dan

analisa data yang diambil dari realita objek berdasarkan pada hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang telah dilakukan di lapangan.

BAB V, dalam bab ini terdiri dari analisis paparan data penelitian dan temuan dari aktulisasi penelitian terhadap peran komite di MTs Darul Ulum Baureno Bojonegoro, serta pembahasan peneliti dalam mendiskripsikan hasil penelitian dikaitkan dengan metode yang dipakai, meliputi hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.

BAB VI, pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dari pembahasan, dan juga saran atas konsep yang telah ditemukan pada pembahasan, berkaitan dengan peran Komite madrasah dalam menunjang Proses belajar mengajar dan meningkatkan mutu pendidikan di MTs Darul Ulum Baureno Bojonegoro.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Komite Sekolah

1. Sejarah Komite Sekolah/Madrasah

Salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Sebagian sekolah/madrasah memang telah menunjukkan peningkatan mutu pendidikan yang cukup menggembirakan, namun pada umumnya, sebagian besar lainnya masih memprihatinkan.⁹ Hal itu menjadi tanggung jawab bersama (pemerintah dan masyarakat), sehingga berbagai upaya dilakukan untuk memberikan kesempatan dan ruang gerak bagi seluruh satuan pendidikan, salah satunya adalah dengan menerapkan konsep partisipasi berbasis masyarakat (*community based participation*) dan manajemen berbasis sekolah (*school based management*).¹⁰

Saat ini konsep tersebut tidak lagi menjadi wacana, namun telah diterapkan di Indonesia. Latar belakang munculnya Komite madrasah tidak dapat dipisahkan dengan organisasi pendahulunya yaitu Persatuan Orang Tua Murid dan Guru (PMOG) dan Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3). Dalam perjalanannya pelaksanaan peran BP3 sebagai badan pembantu penyelenggara pendidikan di sekolah belum meluas dari perannya, yaitu memberikan bantuan dalam bidang keuangan kepada sekolah. Sehingga peran

⁹ E. Mulyasa dkk, *Pedoman Komite madrasah.*, Hlm. 3

¹⁰ 15 Ibid., Hlm. 4

inilah yang melekat dan menjadi stigma masyarakat terhadap keberadaan BP3.¹¹

Pada era krisis ekonomi, pemerintah membentuk satu program yang bernama Komite Sekolah-Jaring Pengaman Sosial (KS-JPS) yang berfungsi memberikan bantuan kepada siswa yang tidak mampu agar tidak putus sekolah. Untuk menentukan sasaran program kerjanya, maka dibentuklah Komite Kabupaten, Komite Kecamatan dan Komite Sekolah. Oleh karena itu ada dua nama 'Komite Sekolah, pertama adalah Komite Sekolah versi KS-JPS, dan kedua adalah Komite Sekolah (KS) sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002. Kedua komite itu sangatlah berbeda, baik dari segi perencanaan, tujuan, peran dan fungsinya.¹²

2. Pengertian Komite Sekolah / Madrasah

Dalam meningkatkan mutu pendidikan dan efektivitas proses belajar mengajar diperlukan suatu kerjasama yang erat antara sekolah, masyarakat, LSM dan orang tua. Hal ini penting, karena sekolah memerlukan partisipasi masyarakat secara universal dalam menyusun program yang relevan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dibentuklah suatu wadah yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk Komite madrasah.

Konsep Komite madrasah mulai digulirkan sejak 2 April 2002, dan mengacu pada undang undang SisDikNas no 23 tahun 2003 dan dijabarkan pada BAB XV pasal 541) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha,

¹¹ Sri Renarni dkk. Hlm. 62-63

¹² Sri Renarni dkk. Hlm. 65

dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan 2) Masyarakat dapat berperan sebagai sumber pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.

Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan sekolah yang terkandung didalamnya memerlukan pemahaman berbagai pihak yang terkait, terutama menyangkut dimana posisi dan apa manfaatnya. Pelibatan masyarakat dalam pendidikan ini dirasa sangat diperlukan, dan sekarang diharapkan tidak hanya konsep wacana, tetapi lebih pada praktik dilapangan. Selama ini dalam realitasnya pelibatan masyarakat dalam pendidikan lebih pada tataran konsep, wacana, atau slogan masih sangat jauh dari apa sangat diharapkan.

Sedangkan dalam surat keputusan (SK) MenDikNas No. 044/U/2002 tentang dewan pendidikan dan Komite Sekolah, Butir 1.1 dinyatakan bahwa Komite Sekolah adalah "badan mandiri yang memadahi peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan pada satuan pendidikan, baik pra-sekolah, jalur sekolah maupun luar sekolah".¹³

Sedangkan pada butir 1.2 dinyatakan bahwa "nama badan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan, seperti Komite pendidikan luar sekolah, Dewan Pendidikan, Majelis Sekolah, Komite TK, atau nama lain yang disepakati".

Komite Sekolah/Madrasah merupakan institusi yang dimunculkan untuk menampung dan menyalurkan partisipasi masyarakat dalam

¹³ MenDikNas, *Lampiran II Surat Keputusan* No. 044/U/2002, (Jakarta,2002), hal. 11

penyelenggaraan pendidikan ditingkat satuan pendidikan. Karena dijadikan sebagai wadah yang representatif. Kemunculan Komite madrasah diharapkan bisa mewujudkan peningkatan mutu, pemerataan, dan efisiensi dalam pengelolaan pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan diluar sekolah.¹⁴

Menurut tim pengembangan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, Komite madrasah merupakan badan yang bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan satuan pendidikan maupun lembaga pemerintah lainnya. Posisi dewan pendidikan, Komite madrasah, satuan pendidikan, dan lembaga-lembaga lainnya yang mengacu pada kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku.¹⁵

Komite madrasah berkedudukan disatuan pendidikan, baik sekolah maupun luar sekolah. Komite madrasah dapat mewadahi satuan pendidikan atau beberapa satuan pendidikan yang sejenis, berada dalam satu kompleks, atau dibawah satu yayasan penyelenggara pendidikan.

3. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan sebagai pegangan dalam pembentukan dewan pendidikan dan Komite Sekolah, termasuk pelaksanaan program kegiatan sosialisasi dan fasilitasi, adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

¹⁴ Ade Irawan, dkk., *Mendagangkan Sekolah*, (Jakarta: Indonesia Corruption watch, 2004), hal. 42

¹⁵ Tim Pengembangan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, "*Indikator Kinerja Dewan Pendidikan dan Komite sekolah*", <http://www.DepDikNas.go.id/serba-serbi/dpks/kinerja>, (diakses pada: Jumat 19 januari 2012)

- b. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000 – 2004.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
- f. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
- g. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 559/C/Kep/PG/2002 tentang Tim Pengembangan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.¹⁶

4. Kedudukan dan Sifat Komite madrasah

Komite madrasah merupakan suatu badan yang mandiri dan berkedudukan disatuan pendidikan, tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan lembaga pemerintah. Komite madrasah berkedudukan di satuan pendidikan, baik sekolah maupun luar sekolah. Satuan pendidikan dalam berbagai jenjang, jenis, dan jalur pendidikan, mempunyai penyebaran lokasi yang amat beragam. Ada sekolah tunggal dan ada sekolah yang berada dalam satu kompleks. Ada sekolah negeri dan ada sekolah swasta yang didirikan oleh yayasan penyelenggara pendidikan. Oleh karena itu, Komite Sekolah dapat dibentuk dengan alternatif sebagai berikut:

¹⁶ Panduan umum dewan pendidikan dan komite sekolah.

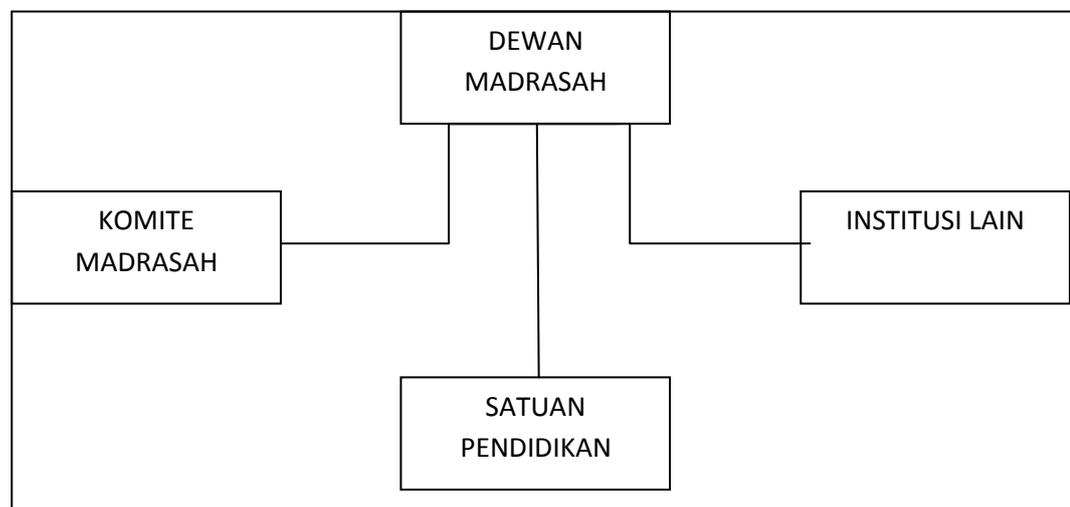
- a. Komite Sekolah yang dibentuk di dalam satu satuan pendidikan, yaitu satuan pendidikan sekolah yang siswanya dalam jumlah yang banyak, atau sekolah khusus seperti sekolah luar biasa, termasuk dalam kategori yang dapat membentuk Komite Sekolah sendiri.
- b. Komite Sekolah yang dibentuk untuk beberapa satuan pendidikan sekolah yang sejenis yaitu, dapat dimisalkan beberapa SD yang terletak di dalam satu kompleks atau kawasan yang berdekatan dapat membentuk satu Komite Sekolah.
- c. Komite Sekolah yang dibentuk untuk beberapa satuan pendidikan yang berbeda jenis dan jenjang pendidikan dan terletak di dalam satu kompleks atau kawasan yang berdekatan yaitu, Sebagai misal ada satu kompleks pendidikan yang terdiri dari satuan pendidikan TK, SD, SLB, dan SMU, dan bahkan SMK dapat membentuk satu Komite Sekolah.
- d. Komite Sekolah yang dibentuk untuk beberapa satuan pendidikan yang berbeda jenis dan jenjang pendidikan milik atau dalam pembinaan satu yayasan penyelenggara pendidikan, misalnya sekolah-sekolah di bawah lembaga pendidikan Muhammadiyah, Al Azhar, Al Izhari, Sekolah Katholik, Sekolah Kristen, dsb.¹⁷

Sedangkan mengenai sifatnya Komite Sekolah merupakan badan yang bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan sekolah maupun lembaga pemerintah lainnya. Komite Sekolah dan sekolah memiliki kemandirian masing-masing, tetapi tetap sebagai mitra yang harus saling

¹⁷ Ibid.,

bekerja sama sejalan dengan konsep manajemen berbasis sekolah (MBS). Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa satuan pendidikan tidak memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan dalam Komite madrasah.

Hubungan antar dewan pendidikan, satuan pendidikan Komite madrasah, dan lembaga-lembaga lainnya adalah bersifat kordinatif. Adapun contoh hubungan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :



Keterangan : ————— hubungan kordinatif¹⁸

5. Tujuan Komite madrasah

Setiap lembaga pasti memiliki tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian juga Komite madrasah sebagai suatu lembaga mempunyai tujuan tertentu. Adapun tujuan dibentuknya Komite madrasah adalah sebagai berikut:

- a. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi serta memprakarsai masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan disatuan pendidikan.

¹⁸ Ade Irawan dkk. Hlm. 45

- b. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan disatuan pendidikan.
- c. Menciptakan suasana dan kondisi transparansi, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan pendidikan yang bermutu disatuan pendidikan.¹⁹

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan tujuan dibentuknya suatu Komite madrasah adalah untuk mewadahi partisipasi pada stakeholders agar turut serta dalam manajemen sekolah sesuai dengan peran dan fungsinya, berkenaan dengan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program sekolah secara proporsional, sehingga Komite madrasah dapat meningkatkan mutu pendidikan. Komite madrasah bertujuan untuk memperdayakan masyarakat sekitar.

Mohammad Noor Syam, dalam "Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan" mengemukakan bahwa hubungan masyarakat dengan pendidikan sangat bersifat korelatif, bahkan seperti telur dengan ayam. Masyarakat maju karena pendidikan, dan pendidikan yang maju hanya akan ditemukan dalam masyarakat yang maju pula.²⁰ Bagaimanapun kemajuan dan keberadaan pendidikan sangat ditentukan oleh peran serta masyarakat yang ada. Tanpa dukungan dan partisipasi masyarakat, jangan diharapkan dapat berkembang dan tumbuh sebagaimana yang diharapkan.

Oleh karena itu, tujuan dibentuknya Komite madrasah adalah untuk mengembangkan program pendidikan dengan melibatkan peran serta

¹⁹ Panduan umum dewan pendidikan dan komite sekolah. Hlm.14

²⁰ Hazbullah, Dasar-Dasar ilmu pendidikan, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001, hal. 9

masyarakat sehingga melahirkan kebijakan dan tanggung jawab terhadap kualitas proses dan hasil pendidikan.

Sementara itu peran Komite madrasah dapat dilihat dari indikator kinerja Komite madrasah sebagai berikut:²¹

TABEL I
Indikator Kinerja Komite Sekolah/ Madrasah

Peran Komite madrasah	Fungsi manajemen pendidikan	Indikator kinerja
Badan pertimbangan <i>(advisory Agency)</i>	1. perencanaan sekolah	a. identifikasi sumber daya masyarakat dalam pendidikan b. memberikan masukan untuk penyusunan RAPBS c. menyelenggarakan rapat RAPBS (sekolah, orang tua siswa, masyarakat) d. memberikan pertimbangan perubahan RAPBS e. ikut mengesahkan

²¹ Hasbullah. *Otonomi Pendidikan.*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), Hlm.96

		RAPBS bersama kepala sekolah .
	2. Pelaksanaan Program a kurikulum b PBM c Penilaian	a. Memberikan masukan terhadap proses pengelolaan pendidikan disekolah b. Memberikan masukan terhadap proses pembelajaran kepada para guru
	4. Pengelolaan Sumber Daya Pendidikan a SDM b S/P c Anggaran	a. Identifikasi potensi sumber daya pendidikan dalam masyarakat b. Memberikan pertimbangan tentang tenaga kependidikan yang dapat diperbarui disekolah c. Memberikan pertimbangan tentang sarana dan prasarana yang dapat diperbantukan disekolah

		d. Memberikan pertimbangan tentang anggaran yang dapat dimanfaatkan disekolah
Badan pendukung (<i>supporting agency</i>)	1. Pengelolaan Sumber Daya	a Memantau kondisi ketenagaan pendidikan disekolah b Mobilisasi guru sukarelawan untuk menanggulangi kekurangan guru disekolah c Mbilisasi tenaga kependidikan non guru untuk mengisi kekurangan disekolah
Badan pengontrol (<i>controlling agency</i>)	2. Pengelolaan Sarana Prasarana	a Memantau kondisi sarana prasaran yang ada diskolah b Mobilisasi bantuan saran dan prasaran sekolah c Mengkordinasi dukungan sarana prasarana sekolah

		<p>d Mengevaluasi pelaksanaan dukungan sarana dan prasarana sekolah</p>
	3. Pengelolaan Anggaran	<p>a Memantau kondisi anggaran pendidikan disekolah</p> <p>b Mobilisasi dukungan terhadap anggaran pendidikan sekolah</p> <p>c Mengkordinasi dukungan terhadap anggaran pendidikan disekolah</p> <p>d Mengevaluasi pelaksanaan dukungan anggaran sekolah</p>
	1. Pengontrol Perencanaan Pendidikan Sekolah	<p>a. Mengontrol proses pengambilan keputusan disekolah</p> <p>b. Mengontrol kualitas kebijakan di sekolah</p> <p>c. Mengontrol proses perencanaan pendidikan</p>

		<p>sekolah</p> <p>d. Pengawasan terhadap kualitas perencanaan sekolah</p> <p>e. Pengawasan terhadap kualitas program sekolah</p>
	<p>2. Memantau Pelaksanaan Program Sekolah</p>	<p>a Memantau organisasi sekolah</p> <p>b Memantau penjadwalan program sekolah</p> <p>c Memantau alokasi anggaran untuk pelaksanaan program sekolah</p> <p>d Memantau partisipasi stake holder pendidikan dalam pelaksanaan program sekolah</p>
	<p>3. Mamantau <i>Out Put</i> Pendidikan</p>	<p>a Memantau hasil ujian akhir</p> <p>b Memantau angka partisipasi sekolah</p>

		<p>c Memantau angka mengulang sekolah</p> <p>d Memantau angka bertahan disekolah</p>
<p>Badan penghubung (<i>Mediator Agency</i>)</p>	1. Perencanaan	<p>a Menjadi penghubung antara Komite madrasah dengan masyarakat, Komite madrasah dengan sekolah, dan Komite madrasah dengan dewan pendidikan</p> <p>b Mengidentifikasi aspirasi masyarakat untuk perencanaan pendidikan</p> <p>c Membuat usulan kebijakan dan program pendidikan kepala sekolah</p>
	2. Pelaksanaan Program	<p>a Mensosialisasikan kebijakan dan program sekolah kepada</p>

		<p>masyarakat</p> <p>b Memfasilitasi berbagai masukan kebijakan program terhadap sekolah</p> <p>c Menampung pengaduan dan keluhan terhadap kebijakan program sekolah</p> <p>d Mengkomunikasikan pengaduan dan keluhan masyarakat terhadap sekolah</p>
	<p>3. Pengelolaan Sumber Daya</p>	<p>a Mengidentifikasi kondisi sumber daya disekolah</p> <p>b Mengidentifikasi sumber sumber daya masyarakat</p> <p>c Memobilisasi bantuan masyarakat untuk pendidikan disekolah</p> <p>d Mengkordinasi bantuan masyarakat²²</p>

²² Ibid., Hlm. 99

6. Peran dan Fungsi Komite madrasah

Adapun peran yang dijalankan Komite Sekolah/Madrasah adalah sebagai berikut:

- a. Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.
- b. Pendukung (*supporting agency*) baik yang berwujud pemikiran, finansial, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
- c. Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.
- d. Mediator antara pemerintah (*executive*) dengan masyarakat dalam satuan pendidikan.²³ Untuk menjalankan perannya itu, Komite Sekolah/Madrasah memiliki fungsi sebagai berikut:
 - a. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
 - b. Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia usaha, dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
 - c. Menampung dan menganalisa aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
 - d. Memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada kepala satuan pendidikan mengenai:
 - 1) Kebijakan program pendidikan

²³ Ade Irawan dkk, Hlm. 43

- 2) Rencana anggaran pendapatan dan belanja madrasah (RAPBM);
 - 3) Kriteria kinerja satuan pendidikan
 - 4) Kriteria kinerja tenaga kependidikan
 - 5) Kriteria fasilitas pendidikan
 - 6) Hal-hal yang terkait dengan pendidikan
- e. Mendorong orang tua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.
- f. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan
- g. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.²⁴

7. Keanggotaan Komite madrasah

Keanggotaan Komite madrasah berasal dari unsur-unsur yang ada dalam masyarakat, unsur dewan guru, yayasan atau lembaga penyelenggara pendidikan, badan pertimbangan desa dapat pula dilibatkan sebagai Komite madrasah. Anggota Komite madrasah yang berasal dari unsur masyarakat berasal dari orang tua atau wali peserta didik, tokoh masyarakat yang menjadi panutan masyarakat yaitu orang yang ucapannya benar-benar didengar sehingga apa yang dikatakan diikuti masyarakat, tokoh pendidikan, dunia usaha atau industri (pengusaha industri, jasa, asosiasi, dan lain-lain), organisasi profesi tenaga pendidikan, wakil alumni, wakil peserta didik. Unsur dewan guru, yayasan atau lembaga penyelenggara pendidikan, badan pertimbangan

²⁴ Ibid., Hlm. 43-44

desa, sebanyak-banyaknya berjumlah 3 (tiga) orang. Jumlah anggota Komite madrasah sekurang-kurangnya 9 (sembilan) orang dan jumlahnya gasal, yang ditetapkan dalam AD/ART.²⁵

8. Kepengurusan Komite madrasah

Pengurus Komite Madrasah ditetapkan berdasarkan AD/ART yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. Ketua, Sekertaris, bendahara dan bidang-bidang tertentu.
- b. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota secara demokratis
- c. Ketua bukan berasal dari kepala satuan pendidikan²⁶

Pengurus Komite Sekolah adalah personal yang ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. Dipilih dari dan oleh anggota secara demokratis dan terbuka dalam musyawarah Komite Sekolah.
- b. Masa kerja ditetapkan oleh musyawarah anggota Komite Sekolah.
- c. Jika diperlukan pengurus Komite Sekolah dapat menunjuk atau dibantu oleh tim ahli sebagai konsultan sesuai dengan bidang keahliannya. Mekanisme kerja pengurus Komite Sekolah dapat diidentifikasi sebagai berikut :
 - a. Pengurus Komite Madrasah terpilih bertanggung jawab kepada musyawarah anggota sebagai forum tertinggi sesuai AD dan ART.
 - b. Pengurus Komite Sekolah menyusun program kerja yang disetujui melalui musyawarah anggota yang berfokus pada peningkatan mutu pelayanan pendidikan peserta didik.

²⁵ Panduan Umum Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Hlm. 15

²⁶ Mendiknas, lampiran II, Hlm.13

- c. Apabila pengurus Komite Sekolah terpilih dinilai tidak produktif dalam masa jabatannya, maka musyawarah anggota dapat memberhentikan dan mengganti dengan kepengurusan baru.
- d. Pembiayaan pengurus Komite Sekolah diambil dari anggaran Komite Sekolah yang ditetapkan melalui musyawarah.²⁷

9. Pembentukan Komite madrasah

Pembentukan Komite madrasah harus dilakukan secara transparan, akuntabel dan demokratis. Dilakukan secara transparan adalah bahwa Komite madrasah harus dibentuk secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat secara luas mulai dari tahap pembentukan panitia persiapan, proses sosialisasi oleh panitia persiapan, kriteria calon anggota, proses pemilihan, dan penyampaian hasil pemilihan. Dilakukan secara akuntabel adalah bahwa panitia persiapan hendaknya menyampaikan laporan pertanggung jawaban kinerjanya maupun penggunaan dana kepanitiaan. Dilakukan secara demokratis adalah bahwa proses pemilihan anggota dan pengurus dilakukan dengan musyawarah mufakat. Jika dipandang perlu pemilihan anggota dan pengurus dapat dilakukan melalui pemungutan suara.

Pembentukan Komite madrasah harus diawali dengan pembentukan panitia persiapan yang dibentuk oleh kepala satuan pendidikan dan atau oleh masyarakat. Panitia persiapan berjumlah sekurang-kurangnya 5 (lima) orang yang terdiri atas kalangan praktisi pendidikan (seperti guru, kepala satuan pendidikan, penyelenggara pendidikan), pemerhati pendidikan (lembaga

²⁷ Ibid,” *Panduan Umum dewan pendidikan dan Komite Sekolah* “

swadaya masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dunia usaha dan industri), dan orang tua peserta didik.²⁸

²⁸ Tim pengembangan Dewan Pendidikan dan Komite sekolah,

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode dan Jenis Penelitian

Pada penelitian ini peneliti mempergunakan metode penelitian kualitatif, karenanya dalam penelitian ini peneliti sama sekali tidak harus menggunakan angka, sehingga dalam mengumpulkan data dan menafsirkannya peneliti tidak perlu menggunakan rumus-rumus statistik. Penelitian ini tidak memanipulasi keadaan dan kondisi sebenarnya, dan menekankan pada deskripsi secara alami. Pengambilan data atau penjarangan fenomena dilakukan dari keadaan yang sewajarnya ini dikenal dengan sebutan “pengambilan data secara alami atau natural”, sehingga dengan sifatnya ini maka dituntut keterlibatan peneliti secara langsung di lapangan.

Menurut Faisal pada penelitian kualitatif yang dipentingkan bukanlah kuantifikasi akan tetapi kedalaman penghayatan terhadap interaksi antar konsep yang sedang dikaji.²⁹

Penelitian kualitatif memiliki sejumlah ciri yang membedakannya dengan penelitian jenis lainnya. Ciri-ciri tersebut menurut Nasution adalah:

1. Sumber data adalah situasi yang wajar atau ”*natural setting*.”

²⁹ Sanapiah Faisal. *Dasar dan Teknik Keilmuan Sosial*, (Surabaya:Usaha Nasional, 1981), Hal.12

2. Peneliti sebagai instrumen penelitian. Peneliti adalah "*key instrument*" atau alat penelitian utama.
3. Sangat deskriptif. Dalam penelitian ini diusahakan mengumpulkan data deskriptif yang banyak dituangkan dalam bentuk laporan dan uraian.
4. *Mementingkan proses maupun produk*, jadi juga mempertimbangkan bagaimana perkembangan terjadinya sesuatu.
5. Mencari makna dibelakang kelakuan atau perbuatan, sehingga dapat memahami masalah atau situasi.
6. Mengutamakan data langsung atau "*first hand*". Untuk itu peneli sendiri yang terjun ke lapangan untuk mengadakan observasi atau wawancara.
7. *Triangulasi*. Data atau informasi dari satu pihak harus di *check* kebenarannya dengan cara memperoleh data itu dari sumber lain, misalnya pihak kedua, ketiga dan seterusnya dengan menggunakan metode yang berbeda-beda.
8. *Menonjolkan rincian kontekstual*. Peneliti mengumpulkan dan mencatat data yang sangat terinci mengenai hal-hal yang dianggap bertalian dengan masalah yang diteliti.
9. *Subjek yang diteliti dipandang berkedudukan sama dengan peneliti*, jadi tidak sebagai objek atau yang lebih rendah kedudukannya.
10. *Mengutamakan perspektif emic*, artinya mementingkan pandangan responden, yakni bagaimana ia memandang dan menafsirkan dunia dari segi pendiriannya.
11. *Verifikasi*, antara lain melalui kasus yang bertentangan atau negatif.

12. *Sampling yang purposif*. Metode naturalistik tidak menggunakan sampling random atau acakan dan tidak menggunakan populasi dan sampel yang banyak.
13. *Partisipasi tanpa mengganggu*.
14. *Mengadakan analisis sejak awal penelitian*, dan selanjutnya sepanjang melakukan penelitian itu.
15. *Desain penelitian tampil dalam proses penelitian*.³⁰

Yang membedakan penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif adalah:

1. Kejelasan unsur: subjek sampel, sumber data tidak mantap dan rinci, masih fleksibel, timbul dan berkembangnya sambil jalan (*emergent*).
2. Langkah penelitian: baru diketahui dengan mantap dan jelas setelah penelitian selesai.
3. Hipotesis: tidak mengemukakan hipotesis sebelumnya, tetapi dapat lahir selama penelitian berlangsung. Hasil penelitiannya terbuka.
4. Desain: desain penelitiannya adalah fleksibel dengan langkah dan hasil yang tidak dapat dipastikan sebelumnya.
5. Pengumpulan data: kegiatan pengumpulan data harus selalu dilakukan sendiri oleh peneliti.
6. Analisis data: dilakukan bersama-sama dengan pengumpulan data.³¹

³⁰ Rochajat Harun, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Pelatihan*, (Bandung:Mandar Maju, 2007), Hal. 15-18

³¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta:PT. Rineka Cipta, 2002), Hal.11

Sedangkan menurut Anslan dan Juliet terdapat banyak alasan dalam menggunakan metode kualitatif antara lain: untuk mendapatkan hasil yang mantap dengan menjadikan peneliti sebagai instrumen penelitian, untuk dapat

Mengungkap dan memahami satu fenomena yang sedikitpun belum diketahui untuk mendapatkan wawasan tentang suatu yang baru sedikit diketahui, dan metode kualitatif memberikan rincian yang komplek tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh metode kuantitatif.³²

Bogdan dan Taylor mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.³³

Dengan demikian karena data yang diperoleh berupa kata-kata atau tindakan, maka jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang hanya menggambarkan, meringkas berbagai kondisi atau berbagai variabel. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Lexy Moleong bahwa jenis penelitian deskriptif merupakan penelitian yang datanya dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka.³⁴

³² Ansen & Juliet. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif Tata Langkah dan Teknik Teoritis Data* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), Hal. 05

³³ Rochajat Harun, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Pelatihan*, (Bandung:Mandar Maju, 2007), Hal. 15

³⁴ Lexy, J. Moleong., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), Hal.6

Dalam mengkaji penelitian ini, peneliti bermaksud memahami realitas empirik dari fenomena-fenomena yang dibiarkan terbuka dan muncul untuk dipahami dan dimaknai berdasarkan interpretasi penulis, kemudian data dihimpun dengan pengamatan yang seksama, meliputi deskripsi yang mendetail disertai catatan-catatan hasil wawancara yang mendalam (*depth interview*) hasil analisis dokumen-dan catatan-catatan dan kemudian.

Dalam penelitian ini penulis ingin mendeskripsikan argumen-argumen yang dikeluarkan oleh komponen-komponen madrasah terhadap peran komite madrasah, apakah sudah sesuai dengan apa yang digariskan pemerintah atau adakah pengembangan yang dilakukan untuk menyempurnakan peran komite madrasah atau bahkan peran komite madrasah tidak berpengaruh dalam pengembangan madrasah karena adanya kendala-kendala yang dihadapi komite madrasah.

Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui fenomena yang terjadi di MTs Darul Ulum Baureno Bojonegoro berkaitan dengan peran komite madrasah dengan cara menangkap fenomena atau gejala yang memancar dari objek yang diteliti. Dengan menggunakan landasan berpikir fenomenologis, penulis berharap akan memperoleh variasi refleksi dari objek yang diteliti. Bagi objek manusia, gejala dapat berupa mimik wajah,

ucapan, tingkah laku, perbuatan dan lain-lain, sehingga peneliti tinggal memberikan interpretasi terhadap gejala-gejala tersebut.³⁵

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian studi kasus. Menurut Husein Umar, jenis penelitian ini merupakan penelitian yang rinci mengenai suatu objek tertentu selama kurun waktu tertentu dengan cukup mendalam dan menyeluruh termasuk lingkungan dan kondisi masa lalunya

Ditinjau dari wilayahnya, maka penelitian studi kasus ini hanya meliputi daerah atau subyek yang sangat sempit, yaitu Komite Madrasah di MTs Darul Ulum Baureno Bojonegoro saja. Tetapi jika ditinjau dari sifat penelitiannya, penelitian studi kasus ini dilakukan dengan lebih mendalam dan terinci. Oleh karena itu, dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian studi kasus memiliki ciri-ciri, diantaranya yaitu: 1) Subyeknya sangat sempit; 2) Penelitian dilakukan dengan lebih mendalam; 3) Data-datanya lebih lengkap dan akurat; 4) Hasil penelitian hanya berlaku bagi obyek yang diteliti. Penelitian studi kasus ini dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap Komite Madrasah di MTs Darul Ulum Baureno Bojonegoro.

Peneliti dapat meneliti peran Komite Madrasah dengan lebih mendalam sehingga dapat terjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul berkaitan dengan peran komite madrasah dalam pengembangan madrasah dan menemukan permasalahan atau kendala yang dihadapi komite madrasah dalam pengembangan madrasah.

³⁵ Husein Umar, Riset Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), Hlm. 81

Langkah-langkah yang diambil peneliti dalam melakukan penelitian studi kasus ini adalah: 1) Mengambil data dengan melakukan wawancara untuk mengetahui peran Komite Madrasah secara lisan; 2) Melakukan tabulasi terhadap angket yang disebar; 3) Membandingkan dan membahas data-data yang diperoleh; 4) Menarik kesimpulan.

B. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus sebagai pengumpul data, dengan maksud peneliti melakukan sendiri pengumpulan data di lapangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain. Maksud dari kalimat peneliti bertindak sebagai instrumen adalah bahwa peneliti tersebut: 1) Memiliki daya responsif yang tinggi, yaitu mampu merespon sambil memberikan interpretasi terus-menerus pada gejala yang dihadapi; 2) Memiliki sifat adaptabel, yaitu mampu menyesuaikan diri, mengubah taktik atau strategi mengikuti kondisi lapangan yang dihadapi; 3) Memiliki kemampuan untuk memandang obyek penelitiannya secara holistik, mengaitkan gejala dengan konteks saat itu, mengaitkan dengan masa lalu, dan dengan kondisi yang relevan; 4) Sanggup terus-menerus menambah pengetahuan untuk bekal dalam melakukan interpretasi terhadap gejala yang muncul; 5) Memiliki kemampuan untuk melakukan klasifikasi agar dengan cepat menginterpretasi, selanjutnya peneliti juga diharapkan memiliki kemampuan menarik kesimpulan mengarah pada perolehan hasil; 6) Memiliki kemampuan untuk mengeksplor dan merumuskan informasi sehingga menjadi bahan masukan bagi pengayaan konsep ilmu.

Instrumen lain yang dipergunakan dalam melakukan pengumpulan data adalah pedoman dokumentasi, pedoman interview dan angket. Oleh karena itu dalam melakukan pengumpulan data peneliti berperan sebagai partisipan penuh, baik dalam teknik interview, dokumentasi, maupun angket. Agar penelitian ini berjalan lancar dan tidak menimbulkan kecurigaan dari pihak yang diteliti, maka peneliti harus diketahui statusnya sebagai peneliti oleh pihak-pihak yang diteliti.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Madrasah Tsanawiyah Darul Ulum yang berlokasi di Jl. Raya desa Nglumber Kec. Kepohbaru Kab. Bojonegoro, sehingga mudah dijangkau oleh peneliti. Selain itu, madrasah ini juga dekat dengan pusat perbelanjaan umum dan instansi layanan masyarakat, seperti kantor polisi, kantor pos, Koramil dan lain-lain.

Alasan utama memilih lokasi ini adalah karena lokasi penelitian dekat dengan daerah peneliti, sehingga peneliti sudah mengetahui dan faham sekali daerah tersebut, sehingga dalam melaksanakan penelitian peneliti dapat dengan mudah melaksanakan tugasnya.

Meskipun madrasah ini tergolong swasta, namun lembaga ini merupakan salah satu lembaga pendidikan yang diminati oleh masyarakat sekitar dibandingkan lembaga pendidikan umum lainnya, baik swasta maupun negeri. Hal ini dapat dilihat dari jumlah murid yang ditampung oleh lembaga pendidikan ini lebih banyak dibandingkan lembaga pendidikan umum lainnya.

D. Sumber data

Menurut Suharsimi Arikunto yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti.³⁶ Sumber data menjelaskan tentang dari mana diperolehnya data dan sifat data yang dikumpulkan serta orang-orang yang dimintai keterangan sehubungan dengan penelitian yang dilakukan.

Menurut Husein Umar jenis data diantaranya adalah:

1. **Data primer:** merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik individu atau perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner.
2. **Data sekunder:** merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak pengumpul lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram.³⁷ Orang-orang yang dimintai keterangan atau informasi berkaitan dengan hal-hal yang diteliti disebut sebagai subjek penelitian atau responden.

³⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), Hlm. 108

³⁷ Husein Umar, *Riset Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), Hlm. 99-100

Subjek penelitian merupakan sumber data atau tempat dimana peneliti memperoleh keterangan yang ada hubungannya dengan Peran Komite Madrasah dalam pengembangan Madrasah. Jadi, kata-kata dan tindakan orang-orang yang diwawancarai akan dijadikan sebagai sumber data utama (data primer), sedangkan angket dan dokumen-dokumen atau sumber tertulis lainnya merupakan sumber data tambahan (data sekunder). Dalam hal ini yang akan dijadikan sumber data utama (data primer) adalah hasil wawancara dengan beberapa komponen madrasah yang dijadikan sebagai subjek penelitian, yaitu Kepala Madrasah, pengurus Komite Madrasah, Guru-guru, dan Tokoh masyarakat atau wali siswa.

Alasan memilih orang-orang tersebut adalah: 1) Kepala Madrasah merupakan orang yang sangat mengerti tentang Komite Madrasah dan dunia pendidikan; 2) Pengurus Komite Madrasah merupakan subyek utama yang menangani secara langsung Komite Madrasah; 3) Guru-guru merupakan orang yang dikenai dampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap keberadaan Komite Madrasah; 4) Tokoh Masyarakat atau Wali Siswa merupakan unsur penting yang mempengaruhi kinerja Komite Madrasah dalam menyampaikan aspirasi masyarakat.

Disamping itu, peneliti ingin membandingkan pendapat antar komponen tentang peran Komite Madrasah dalam pengembangan Madrasah di MTs Darul Ulum Baureno Bojonegoro, apakah ada kesamaan pendapat antar komponen atautkah terdapat perbedaan pendapat yang signifikan sehingga berpengaruh terhadap program kerja Madrasah dalam rangka

pengembangan Madrasah menjadi lebih baik. Dengan demikian peneliti dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan Komite Madrasah. Sedangkan yang akan dijadikan sumber data tambahan (data sekunder) adalah dokumen-dokumen Madrasah, dokumen Komite Madrasah, catatan hasil rapat, dan lain-lain. Dokumen-dokumen tersebut merupakan data tambahan yang akan digunakan sebagai pelengkap data primer, namun tidak menutup kemungkinan dokumen-dokumen tersebut dijadikan sebagai data primer jika data tersebut berisi tentang catatan penting berkaitan dengan peran Komite Madrasah dalam pengembangan Madrasah di MTs Darul Ulum Baureno Bojonegoro.

E. Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana yang dikemukakan Lexi J. moleong, bahwa tahap-tahap penelitian sebagai berikut: pertama ialah mengetahui sesuatu tentang apa yang belum diketahui, tahap ini dikenal dengan tahap orientasi yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang tepat tentang latar belakang penelitian. Tahap kedua adalah tahap elesplorasi fokus, pada tahap ini mulai memasuki proses pengumpulan data, yaitu cara-cara yang digunakan dalam pengumpulan data. Dan tahap ketiga adalah rencana tentang teknik yang digunakan untuk melakukan pengecekan dan pemeriksaan keabsahan data.³⁸

Ketiga tahap penelitian tersebut diatas akan diikuti dan dilakukan oleh peneliti, Pertama adalah orientasi (Pra Lapangan) yaitu mengunjungi

³⁸ Ibid, hal. 85

dan bertatap muka dengan kepala sekolah. Pada tahap ini (orientasi) kegiatan yang dilakukan oleh peneliti adalah :

1. Mohon izin kepada kepala sekolah untuk penelitian.
2. Merancang usulan penelitian.
3. Menyiapkan kelengkapan penelitian.
4. Mengkosultasikan rencana penelitian.

Kedua adalah eksplorasi fokus (Pekerjaan Lapangan) yaitu setelah mengadakan orientasi diatas, kegiatan yang dilakukan penelitian adalah pengumpulan data dengan cara :

- a. Interview dengan subyek yang telah dipilih yaitu : Ketua komite dan pengurus.
- b. Menggali dokumen, berupa faktor-faktor yang berkaitan dengan penelitian.

Ketiga adalah tahap pengecekan dan pemeriksaan keabsahan data. Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan peneliti adalah mengadakan pengecekan data pada subyek atau dokumen untuk membuktikan validitas data yang diperoleh.

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah metode pengumpulan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang berlangsung. Kegiatan tersebut dapat berkenaan dengan cara guru mengajar, siswa

belajar, kepala madrasah yang sedang memberi pengarahan atau personil kepegawaian yang sedang rapat. Sedangkan Arikunto mengemukakan bahwa observasi atau disebut juga dengan pengamatan meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan segala indera. Metode observasi penulis gunakan untuk mengamati peristiwa-peristiwa yang terjadi dilapangan dengan kaitanya mengenai peran Komite madrasah dalam pengembangan Madrasah Tsanawiyah Darul Ulum Baureno Bojonegoro. Misalnya data tentang sejarah madrasah, visi, misi, dan tujuan madrasah, data guru dan karyawan, serta data mengenai komite madrasah. Untuk lebih jelasnya lihat lampiran.

Jenis-jenis teknik observasi adalah:

1. Partisipasi lawanya non partisipasi
2. Sistematis lawanya non sistematis
3. Eksperimental lawanya noneksperimental

Disini peneliti memakai jenis observasi partisipasi dikarenakan peneliti harus terjun langsung di lapangan untuk melihat kondisi, meneliti, dan mengamati objek penelitian³⁹.

2. Interview/wawancara

Interview/wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara /*interviewer* untuk memperoleh informasi dari

³⁹ Amirul Hadi, metodologi penelitian pendidikan, Bandung: CV Pustaka Setia, 2005, hlm. 95

terwawancara.⁴⁰ Wawancara ini peneliti gunakan untuk mengetahui peran Komite Madrasah dalam pengembangan madrasah serta kendala yang dihadapi oleh Komite Madrasah dalam pengembangan madrasah di MTs Darul Ulum Baureno Bojonegoro. Yang menjadi objek wawancara adalah Kepala MTs Darul Ulum Baureno Bojonegoro serta beberapa pengurus Komite Madrasah.

Wawancara mempunyai keunikan yang menguntungkan, yaitu tidak memerlukan kesimpulan, tetapi memerlukan kelanjutan⁴¹. Wawancara, yaitu sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari informan (terwawancara). Data yang dikumpulkan disini adalah data verbal yang didapat dari tanya jawab dan percakapan tetapi tidak menutup kemungkinan juga didapatkan data non-verbal yaitu berupa gerak muka dan tubuh dari responden yang bermakna. Teknik yang digunakan dalam wawancara/interview ini adalah interview bebas terpimpin, yaitu gabungan dari interview bebas dan interview terpimpin, yaitu pewawancara membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan dan selanjutnya dikembangkan dalam proses wawancara tersebut. Informan yang dibutuhkan untuk mengetahui peran dan kontribusi Komite Madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah ketua, sekretaris dan anggota Komite Madrasah. Selanjutnya penggalan informasi tentang strategi yang

⁴⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, Hlm. 128

⁴¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Rosda Karya, 2006), Hlm. 203

digunakan untuk mengoptimalkan peran Komite Madrasah Di MTs Darul Ulum dilakukan wawancara dengan Kepala Madrasah.

Jenis-jenis wawancara ada dua, tak terpimpin dan terpimpin. Wawancara tidak terpimpin adalah wawancara yang tidak terarah. Kelemahannya adalah tidak efisien waktu, biaya, dan tenaga. Keuntungannya adalah cocok untuk penelitian pendahuluan, tidak memerlukan keterampilan bertanya, dan dapat memelihara kewajaran suasana. Sedangkan wawancara terpimpin adalah tanya jawab yang terarah untuk mengumpulkan data-data yang relevan saja. Kelemahan teknik ini adalah adanya kesan seperti angket yang diucapkan, suasana menjadi kaku dan formal, sedangkan keuntungan teknik ini adalah pertanyaan sistematis sehingga mudah diolah kembali, pemecahan masalah lebih mudah, memungkinkan analisis kuantitatif dan kualitatif, dan kesimpulan yang diperoleh lebih reliabel⁴². Peneliti disini menggunakan jenis wawancara tak terpimpin, karena tempat yang jauh dengan universitas dan untuk mengefisiensikan waktu.

Data-data yang akan diambil peneliti dengan menggunakan metode wawancara adalah data tentang peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di Madrasah, peran Komite Madrasah sebagai pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di Madrasah, peran Komite Madrasah sebagai mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di Madrasah, kendala-kendala yang mungkin dihadapi Komite Madrasah di Madrasah.

⁴² Amirul Hadi, metodologi penelitian pendidikan, Bandung: CV Pustaka Setia, 2005, hlm. 98

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Keuntungan menggunakan dokumentasi ialah biayanya relatif murah, waktu dan tenaga lebih efisien.⁴³ Metode ini peneliti gunakan untuk memperoleh data dan catatancatatan mengenai:

- a) Hasil-hasil rapat Komite Madrasah
- b) Arsip-arsip Komite Madrasah
- c) Profil MTs Darul Ulum Baureno Bojonegoro
- d) Arsip-arsip MTs Darul Ulum Baureno Bojonegoro

Data-data yang akan diambil peneliti dengan menggunakan metode dokumentasi adalah data tentang:

- a) Latar belakang berdirinya Komite Madrasah
- b) Struktur Organisasi Komite Madrasah
- c) Keputusan-keputusan Komite Madrasah
- d) Keuangan
- e) Program Kerja Komite Madrasah
- f) Strategi pengembangan Madrasah
- g) Sejarah berdirinya MTs Darul Ulum Baureno Bojonegoro
- h) Keadaan Guru dan Karyawan
- i) Keadaan siswa
- j) Keadaan sarana dan prasarana

⁴³ Amirul Hadi-Haryono, 2005, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Bandung: CV. Pustaka Setia. Hlm. 110

k) Job Description

l) Program Kerja

m) Struktur Organisasi MTs Darul Ulum Baureno Bojonegoro

Untuk dokumentasi ini Peneliti mengambil beberapa data yang diperoleh pada saat penelitian berlangsung, sehingga keabsahan data benar-benar bisa terjaga.

G. Teknik Analisis Data

Setelah semua data yang diperlukan diperoleh, maka langkah selanjutnya adalah data tersebut dianalisis untuk mengambil suatu kesimpulan mengenai Peran Komite Madrasah dalam Pengembangan Madrasah di MTs Darul Ulum Baureno Bojonegoro. Analisis data adalah penjabaran data kedalam kategori-kategori dan sifat-sifatnya setelah data ditelaah secara cermat, sehingga dapat ditemukan pokok-pokok pikiran sesuai dengan masalah penelitian. Dalam penelitian ini jenis analisis data yang dipergunakan adalah analisis deskriptif-eksploratif.

Analisis data kualitatif (Bogdan dan Biglen, 1982) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesisnya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Di pihak lain, analisis data kualitatif (Seidell, 1998), prosesnya berjalan sebagai berikut:

1. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya dapat ditelusuri
2. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesiskan, membuat ikhtisar, dan membuat indeksinya,
3. Berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum.

Selanjutnya menurut Janice McDrudry (*Collaborative Group Analysis of Data, 1999*) tahapan analisis data kualitatif adalah sebagai berikut:

1. Membaca/mempelajari data, menandai kata-kata kunci dan gagasan yang ada dalam data
2. Mempelajari kata-kata kunci itu, berupaya menemukan tema-tema yang berasal dari data
3. Menuliskan “model” yang ditemukan
4. Koding yang telah dilakukan

Dari penjelasan di atas, bahwa ada yang mengemukakan proses, ada pula yang menjelaskan tentang komponen-komponen yang perlu ada dalam suatu analisis data⁴⁴.

Menurut Mohyi Machdhoero, dalam penelitian deskriptif eksploratif ini peneliti mencari atau mengumpulkan data-data dengan tujuan untuk mengetahui tentang gambaran dari suatu keadaan fenomena dan

⁴⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Rosda Karya, 2006), Hlm. 248

bersifat menjelajahi data-data yang bersifat kualitatif maupun data yang berupa kalimat-kalimat, dilakukan dengan cara menggambarannya dengan kata-kata atau kalimat sesuai dengan hasil informasi data yang diperoleh. Apabila datanya telah terkumpul, maka lalu diklasifikasikan menjadi dua kelompok data, yaitu data kuantitatif yang berbentuk angka-angka dan data kualitatif yang dinyatakan dalam kata-kata atau symbol.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Keadaan MTs Darul Ulum Baureno Bojonegoro

1. Sejarah Singkat Berdirinya

Madrasah Tsanawiyah Darul Ulum Nglumber Kepohbaru berdiri pada tahun Pelajaran 1994/1995, didasari oleh beberapa hal sebagai berikut :

- a. Dicetuskanya Wajib belajar 9 tahun. Pada tahun Pelajaran 1994/1995 pemerintah mencanangkan Program Wajib belajar sembilan tahun dimana siswa lulusan SD/MI yang menyelesaikan studinya selama enam tahun diwajibkan menambah/menuntaskan belajarnya sampai jenjang SMP/MTs tiga tahun lagi. Dan .diprediksi akan terjadi kelebihan kuota dimasing-masing SLTP pada pendaftaran/penerimaan murid baru .
- b. Mayoritas lingkungan masyarakat di wilayah Kecamatan Kepohbaru adalah warga NU

Didasari belum adanya lembaga sekolah diwilayah Kecamatan Kepohbaru bagian barat yang mewakili wargsa Nahdliyin , maka perlunya lembaga pendidikan yang akan menampung peserta didik putra putri Warga Nahdliyin yang kedepan guna mempersiapkan masa depannya dan melestarikan / mengembangkan aqidah Ahlussunnah Waljamaah.

- c. Adanya lokasi yang strategis

Pemilihan lokasi ini didasari beberapa pertimbangan, diantaranya wilayah desa Nglumber bertempat ditengah-tengan wilayah Kecamatan

Kepohbaru, mudah dijangkau karena tepat berada dipinggir jalan raya Kecamatan Kepohbaru Baureno dan lokasi yang dipilih jauh dengan letak sekolah/Madrasah setingkat disekelilingnya.

d. Banyaknya sekolah SD/MI sebagai modal pemasukan siswa baru

I. Gagasan Pendirian

a. Tahapan Satu

Pendirian Madrasah Tsanawiyah Darul Ulum Nglumber Kepohbaru digagas oleh seorang tokoh atau pejuang dilingkungan Nahdlatul Ulama Kepohbaru yaitu Bapak Drs. FATHUL AMIN yang beralamat di desa Jipo Kecamatan Kepohbaru

b. Tahapan dua

Berikutnya beliau mengumpulkan tokoh-tokoh diwilayah Kecamatan Kepohbaru diajak berembug mmenentukan jenis sekolah serta mempersiapkan segala sesuatunya yang terkait dengan sarana dan ketenagaan.Diantaranya tokoh-tokoh tersebut adalah :

1. Drs.H. Abdul Roziq (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepohbaru) dengan alamat tetap di Kecamatan Sumberrejo Bojonegoro.
2. K.Moh.Ilham Minhadi (Rois Syuriah MWCNU Kepohbaru) beralamat tetap di desa Brangkal Kepohbaru
3. H.Dasuki (Kepala MI Darul Ulum Nglumber Kepohbaru) beralamat tetap di desa Nglumber Kepohbaru
4. M Sholihun (Wiraswasta) beralamat tetap desa Nglumber Kepohbaru

5. H. Agus Salim (Wiraswasta) beralamat tetap di desa Nglumber Kecamatan kepohbaru

Ditambah dengan beberapa tokoh lainya yang tidak disebutkan mengadakan pertemuan di kediaman Bp. H. Agus Salim yang pada akhirnya memilih lembaga sekolah dibawah naungan Lembaga Maarif NU “ Madrasah Tsanawiyah Darul Ulum “ menginduk di Departemen Agama. Dan untuk sementara proses kegiatan belajar mengajar menempati gedung MI Darul Ulum Nglumber Kepohbaru masuk pada sore hari terhitung selama tiga tahun.

a. Perumusan Piagam Madrasah

Untuk memperkuat keberadaan MTs darul Ulum secara formal maka pada tahun 1996 diajukan untuk mendapatkan piagam Madrasah. Setelah diadakan peninjauan dan evaluasi dari Kasi Mapenda Kandepag Bojonegoro akhirnya didapatkan piagam terdaftar dari Kepala Kanwil Depag Propinsi Jawa Timur.

2. Visi, Misi dan Tujuan MTs Darul Ulum Baureno Bojonegoro

a. Visi MTs Darul Ulum Baureno Bojonegoro

Visi: " Membentuk budi pekerti luhur , sehat jasmani dan melaksanakan konsep belajar bebas dan menyenangkan ,menuju prestasi belajar dan melaksanakan ibadah ala ahlussunnah Waljamaah.",

b. Misi MTs Darul Ulum Baureno Bojonegoro

1. Melaksanakan pembelajaran intensif mengacu KTSP

2. Melaksanakan Kegiatan ekstra kurikuler (BMK, Pramuka, tilawatil Qur'an, Qosidah, rebana, drumband, futsal, volley ball, Computer).
3. Mewujudkan lingkungan belajar (alam, Sarana dan pelaku) yang aman, sehat, harmonis dan menyenangkan.
4. Pembiasaan pemakaian bahasa Krama Inggil pada hari Jum'at.
5. Menerapkan model konpensasi (bukan hukuman) yang mengarah pada kecerdasan dan skill menuju prestasi belajar dalam menindaklanjuti pelanggaran tata tertib/kegiatan Madrasah.
6. Melaksanakan pembiasaan disiplin, Sholat dhuha, Sholat Dzuhur, doa bersama dan istighosah
7. Melaksanakan pembelajaran dan pembimbingan secara aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan (PAKEM) dalam pencapaian prestasi akademik dan non akademik dengan pendekatan CTL (Contextual Teaching Learning).
8. Melaksanakan pembelajaran bertaraf internasional dengan membuka kelas ICP (International Class program) berbasis Combridge

3. Letak Geografis

Madrasah Tsanawiyah Darul Ulum Baureno Bojonegoro merupakan bagian dari unit pendidikan yang ada di Jl. Raya desa Nglumber Kec. Kepohbaru Kab. Bojonegoro.

4. Keadaan Guru dan Karyawan

Guru merupakan faktor yang paling penting dalam suatu lembaga pendidikan, karena disamping sebagai pengajar dan pendidik, juga sebagai perantara siswa dalam proses belajar untuk mencapai tujuan pendidikan. Data lengkap guru dan karyawan dapat dilihat dalam lampiran 1. Berikut adalah tabel data guru menurut tingkat pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel II

Tabel Data Guru Menurut Tingkat Pendidikan

Tahun Ajaran 2011/2012

No	Nama guru	Jenis Kelamin		Pendidikan
		L	P	
1	Drs. J U K I, M. Pd.	√		S-2/ teknologi pembelajaran
2	Drs. Abdul Rozak	√		P A I
3	Abu Said	√		M A
4	M. Said	√		M A
5	Drs. Mujiono	√		P A I
6	Drs. Kozin	√		P A I
7	Ainurrofiq, S. Ag.	√		P A I
8	Siti Rohmah, S. Ag.		√	P A I
9	Ahmad Suudi, S. Ag	√		P A I
10	M. Ma'sun, S. Pd.	√		Bhs. Indonesia
11	M. Ali Mas'ud, S. Pd.	√		Penjaskes
12	M. Salim, S.Pd.	√		Bhs. Inggris
13	Ninik Puji Lestari, S. Pd.		√	Matematika
14	Sumarlan, S.H.	√		Hukum
15	Ahmad Junaidi, S. Pd.	√		P A I
16	Lailatul Maghfiroh, S. Pd.		√	D-II
17	Khusnul Azuzah, S. Sos.		√	Syari'ah
18	Budi Utomo	√		SMA
19	Muhaimin, S. Pd.	√		MA
20	Wawan	√		MA

21	Mufid murtadho, S. Pd.	√		B P
22	Enik Nur awamah, S. Pd.		√	Matematika
23	M. Mahmudi, S. Pd.	√		Pend. Fisika
24	Suwarno	√		SMP
JUMLAH		19	5	
		24		

Sumber: MTs Darul Ulum Baureno Bojonegoro Tahun Ajaran 2011/2012

5. Keadaan Siswa

Pada tahun ajaran 2007/2010 siswa Kelas VII yang diterima di MTs Darul Ulum Baureno Bojonegoro sebanyak 63 siswa. Data lengkap siswa dapat dilihat dalam lampiran 2. Data berikut menunjukkan gambaran siswa MTs Darul Ulum Baureno Bojonegoro.

Tabel III

Data Siswa MTs Darul Ulum Baureno Bojonegoro

Tahun Ajaran 2007-2010

No	Kelas	Jumlah siswa							
		2007		2008		2009		2010	
		L	P	L	P	L	P	L	P
1	Kels VII	46	33	30	34	28	18	36	27
2	Kelas VIII	22	38	47	33	26	36	25	17
3	Kelas IX	19	29	21	28	35	34	25	36
Jumlah		87	90	98	95	89	88	86	80

Sumber: MTs Darul Ulum Baureno Bojonegoro Gurah Tahun Ajaran 2007-2010

6. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasaran yang ada di MTs Darul Ulum Baureno Bojonegoro mulai dikembangkan untuk bisa memenuhi kebutuhan siswa akan pengajaran yang lebih optimal. Berdasarkan data yang didapat dari arsip MTs Darul Ulum Baureno Bojonegoro, pada tahun ajaran 2011/2012 sarana dan prasarana yang ada di MTs Darul Ulum Baureno Bojonegoro adalah sebagai berikut:

1. Sarana belajar

a. Sumber belajar

Di perpustakaan MTs Darul Ulum Baureno Bojonegoro buku yang ada meliputi: Buku perpustakaan, Buku penunjang pelajaran, Buku pelajaran, Buku referens, Koran/surat kabar, dan Majalah

2. Prasarana Belajar

Tabel IV

Prasarana Belajar MTs Darul Ulum Baureno Bojonegoro

Tahun Ajaran 2007/2010

No	Sarana	Jumlah			
		2007	2008	2009	2010
1	Ruang Kelas	4	4	5	5
2	Ruang Perpustakaan	-	-	-	-
3	Ruang laboratorium IPA	-	-	1	1
4	Ruang laboratorium IPS	-	-	-	-
5	Ruang laboratorium bahasa	-	-	-	-
6	Ruang laboratorium Komputer	-	-	-	-

7	Ruang Klinik/ unik Kesehatan madrasah	-	-	-	-
8	WC / Toilet	-	1	5	5
9	Internet	-	-	1	1

Sumber: MTs Darul Ulum Baureno Bojonegoro Tahun Ajaran 2007/2010

7. Struktur Organisasi

Struktur organisasi sangat diperlukan dalam suatu lembaga baik instansi maupun pada Madrasah. Struktur organisasi menunjukkan suatu arah prosedur kebijakan dan kinerja Kepala Madrasah beserta Staf-stafnya agar tercipta suasana kerja yang baik. Gambar Struktur Organisasi Madrasah di MTs Darul Ulum Baureno Bojonegoro dapat dilihat dalam lampiran 2.

8. Fungsi dan Tugas Pengelola Madrasah

Setiap komponen pengelola madrasah memiliki fungsi dan tugas yang sangat penting, antara satu dengan lainnya memiliki kaitan yang erat dan saling mendukung. Penjelasan mengenai fungsi dan tugas pengelola Madrasah di MTs Darul Ulum Baureno Bojonegoro dapat dilihat dalam lampiran 3.

9. Program Kerja Madrasah

Dalam menjalankan kegiatan pendidikan di Madrasah, maka Madrasah melakukan perencanaan kegiatan yang dituangkan dalam sebuah rancangan yang disebut dengan program kerja madrasah. Program kerja ini berguna untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan proses belajar-mengajar agar tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud. Penjelasan tentang program kerja madrasah di MTs Darul Ulum Baureno Bojonegoro dapat dilihat di lampiran 4.

B. Komite Madrasah

1. Sejarah Komite Madrasah

Komite Madrasah merupakan hal yang baru dalam dunia pendidikan. Banyak yang beranggapan bahwa Komite Madrasah sama dengan yang namanya BP-3, akan tetapi komite Madrasah cakupannya lebih luas bila dibandingkan dengan BP-3 dalam hal fungsi dan tujuannya serta perannya bagi lembaga pendidikan. Komite Madrasah

Dunia pendidikan bergerak cepat seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang melahirkan adanya globalisasi. Pengelolaan pendidikan dibutuhkan pengelolaan manajemen yang kondusif/stabil.

Seperti halnya pada MTs Darul Ulum Nglumber Kepohbaru yang dahulu semenjak berdiri ditangani sendiri oleh Pengurus LP Maarif Darul ulum , diharuskan untuk melebarkan sayap dalam pengelolaanya. Dalam hal ini pengurus LP Maarif Darul ulum membentuk tim yang tergabung dalam Komite Madrasah. Dimana Tugas komite Madrasah untuk bekerjasama dengan Kepala madrasah dalam mewujudkan proses kegiatan di Madrasah.

Struktur Komite Madrasah diambil dari unsur pengurus Yayasan LP maarif Darul Ulum, dewan guru.

2. Struktur Organisasi Komite Madrasah

Dalam arsip Madrasah maupun Komite Madrasah, tidak ditemukan adanya struktur organisasi pengurus Komite Madrasah secara mendetail, sehingga tidak begitu jelas hubungan antar pengurus itu sendiri. Namun, penulis menemukan adanya hubungan antar pengurus Komite Madrasah yang tertuang dalam susunan Komite Madrasah. Dari susunan Komite Madrasah tersebut penulis membuat gambaran struktur organisasi pengurus Komite Madrasah bisa dilihat di lampiran 5.

3. Tujuan dibentuknya Komite Madrasah

Tujuan dibentuknya Komite Madrasah di MTs Darul Ulum Baureno Bojonegoro diantaranya adalah:

- a) Mewadahi dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada Madrasah dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang dibuat Madrasah dalam rangka mengembangkan Madrasah dan memajukan Madrasah.
- b) Mengembangkan peran serta masyarakat dalam mensukseskan kegiatan belajar mengajar di Madrasah.
- c) Menciptakan nuansa demokratis antara masyarakat dan madrasah sehingga terjadi hubungan yang baik antara masyarakat dan madrasah, serta terciptanya kondisi yang transparan, dan bertanggung-jawab dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di MTs Darul Ulum Baureno Bojonegoro .

4. Tugas dan Fungsi Komite Madrasah

Tugas dan fungsi Komite Madrasah di MTs Darul Ulum Baureno Bojonegoro adalah sebagai berikut:

- a) Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/ dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu
- b) Menampung dan menyalurkan aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat
- c) Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada madrasah mengenai:
 - 1) Kebijakan dan program pendidikan
 - 2) Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Madrasah (RAPBM)
 - 3) Kriteria kinerja satuan pendidikan
 - 4) Kriteria tenaga kependidikan
 - 5) Kriteria fasilitas pendidikan
 - 6) Hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan
- d) Mendorong orangtua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan
- e) Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di MTs Darul Ulum Baureno Bojonegoro, baik berupa iuran SPP maupun infaq

f) Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di Madrasah, baik melalui rapat-rapat maupun meminta laporan pertanggung-jawaban Madrasah setiap akhir tahun pelajaran. Jika BP-3 hanya bertugas sebagai penentu besarnya iuran BP-3 saja, maka Komite Madrasah selain menjadi mediator (wakil masyarakat) juga bertugas memberi pertimbangan dalam menentukan besarnya iuran SPP supaya masyarakat tidak merasa keberatan, dan madrasah juga tidak kekurangan. Selain itu Komite Madrasah juga bisa membantu keuangan Madrasah dengan mencari donatur dari instansi-instansi yang peduli dengan pendidikan, sehingga kebutuhan Madrasah akan pendanaan dapat tercukupi.

5. Keuangan Komite Madrasah

Keuangan Komite Madrasah dikelola oleh bendahara Komite kemudian dana yang diperoleh diserahkan kepada Madrasah untuk dipergunakan sebagai dana penyelenggaraan pendidikan. Meskipun dana yang diperoleh tidak selalu besar jumlahnya, akan tetapi dana tersebut cukup membantu dalam penyelenggaraan pendidikan.

C. Peran Komite Madrasah Dalam Pengembangan Madrasah

1. Peran Komite Madrasah sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di Madrasah

Pengembangan yang telah dilakukan oleh Komite Madrasah dalam rangka memberi pertimbangan adalah menyangkut masalah sarana dan prasarana, program yang dilakukan pada tahun ajaran 2010/2011 berdasarkan kesepakatan antara pihak Madrasah dengan orang tua atau wali siswa adalah sebagai berikut :

- a. Pengadaan laboratorium bahasa
- b. Pengadaan buku pemakaian laboratorium bahasa
- c. Pengadaan rebana dan alat olah raga
- d. Pengadaan/penambahan komputer

Karena Komite Madrasah adalah sebuah wadah yang menampung aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program kerja Madrasah, maka seluruh lapisan masyarakat dituntut untuk berperan aktif dalam meningkatkan tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan, serta menciptakan kondisi dan suasana transparan, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu.

Komite Madrasah disini sangat berperan sekali untuk pengembangan MTs Darul Ulum ini, missal saja untuk pembangunan dan melengkapi sarana dan prasarana perlu partisipasi semua pihak, komite dan masyarakat harus bekerja keras untuk mewujudkannya. Banyak sekali ⁴⁵

⁴⁵ Wawancara dengan M. Syamsuudin, Ketua Komite Madrasah MTs Darul Ulum Baureno Bojonegoro, Tanggal 06 Januari 2012, Pukul 09.00 WIB

Disamping itu Komite Madrasah juga berusaha mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap pendidikan bermutu dengan melakukan kerjasama dengan masyarakat, kemudian menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan maupun masukan yang berasal dari masyarakat untuk dipergunakan sebagai bahan dalam memberi pertimbangan kepada Madrasah dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di MTs Darul Ulum Baureno Bojonegoro.

Komite Madrasah selalu memotivasi orang tua/wali siswa dan masyarakat sekitar agar lebih aktif dalam memberikan masukan, baik yang berupa kritik, saran, ide, tuntutan dan yang semacamnya demi meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di MTs Darul Ulum Baureno Bojonegoro⁴⁶. Komite Madrasah juga mendorong orang tua/wali siswa dan masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pendidikan dengan menggalang dana masyarakat dan turut serta melakukan evaluasi.

2. Peran Komite Madrasah sebagai pendukung (*supporting agency*), baik yang berwujud financial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di Madrasah

Dalam mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan di MTs Darul Ulum Baureno Bojonegoro, Madrasah dan Komite Madrasah harus berusaha sendiri untuk memperoleh dana yang berasal dari SPP, infaq, sumbangan sukarela orang tua siswa atau sumbangan lain yang tidak mengikat dari

⁴⁶ Wawancara dengan M. Syamsudin, Ibid

instansi-instansi atau dari para donatur yang peduli pendidikan. Sedangkan dana untuk penyelenggaraan pendidikan berasal dari dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah).

Dukungan pemikiran yang diberikan oleh Komite Madrasah kepada Madrasah diwujudkan dengan memberi pertimbangan dalam menentukan besarnya SPP, merancang RAPBM, merencanakan program kerja, Bimbingan dan Konseling siswa, dan memecahkan masalah-masalah yang muncul berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan. Bahan pertimbangan yang diberikan Komite Madrasah berasal dari aspirasi, ide, dan tuntutan masyarakat yang telah ditampung dan diolah sedemikian rupa oleh Komite Madrasah.

Semua program madrasah dan Komite Madrasah harus didukung oleh semua pihak, tidak terkecuali. Karena semuanya dimadrasah ini saling membantu dan mendukung. Apalagi komite madrasah yang salah satu peranya adalah sebagai pendukung. Tentunya harus selalu membantu agar semua yang telah direncanakan berjalan dengan lancar.⁴⁷

Biasanya disini diadakan rapat bulanan yang nantinya menghasilkan banyak program untuk dapat dilaksanakan, dan masyarakatpun sangat mendukung dengan adanya program ini sehingga pada saat ada kegiatan atau program yang ingin dicapai pastinya semua gotong royong untuk mewujudkannya.⁴⁸

⁴⁷ Wawancara dengan M. Syamsudin, Ibid.

⁴⁸ Wawancara dengan M. Syamsudin, Ibid.

Oleh karena itu, untuk menjalankan peran, tugas dan fungsinya dengan baik, Komite Madrasah sengaja dipilih dari orang-orang benar-benar memahami dunia pendidikan dan mempunyai komunikasi yang baik dengan pihak Madrasah maupun masyarakat.

3. Peran Komite Madrasah sebagai pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di Madrasah

Dalam melakukan kontrol terhadap Madrasah, Komite Madrasah mengadakan rapat koordinasi secara intensif agar dapat mengontrol dan mengarahkan program-program yang telah direncanakan Madrasah demi tercapainya tujuan bersama antara masyarakat dan pihak Madrasah. Pertemuan ini bertujuan untuk menetapkan dan mengevaluasi program kerja Madrasah dalam penyelenggaraan pendidikan di MTs Darul Ulum Baureno Bojonegoro.

Dari hasil rapat Komite Madrasah yang diadakan pada tanggal 21 Juli 2011 mengenai kondisi dan rekomendasi rencana kegiatan MTs Darul Ulum Baureno Bojonegoro tahun pelajaran 2011/2012, tampak Komite Madrasah sangat memperhatikan perkembangan dan segala kebutuhan yang ada di MTs Darul Ulum Baureno Bojonegoro. Komite Madrasah membuat komitmen untuk mengembangkan madrasah secara kompetitif sehingga MTs Darul Ulum Baureno Bojonegoro tidak ketinggalan dengan Madrasah-Madrasah atau sekolah-sekolah yang lain. Oleh karena itu saya juga harus berperan aktif dalam semua program yang ada, saya selaku kepala madrasah tentunya akan sangat

bangga ketika semuanya berjalan dengan lancar. Bahkan kalau perlu dibuat agar madrasah ini terkenal dan memiliki ciri khas agar masyarakat tahu dimana letak perbedaan dengan madrasah lainnya.⁴⁹

4. Peran Komite Madrasah sebagai mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di Madrasah

Peran ini tidak dilaksanakan penuh oleh Komite Madrasah. Untuk berkomunikasi dengan orang tua/wali siswa dan masyarakat, Komite Madrasah bisa mengundang langsung dan berkomunikasi verbal secara langsung. Namun, untuk berkomunikasi dengan pemerintah, baik pusat maupun daerah, dilakukan sendiri oleh pihak Madrasah karena bagaimanapun juga diantara pengurus Komite Madrasah juga terdapat beberapa pengelola Madrasah. Sedangkan Komite Madrasah hanya menerima laporan hasil komunikasi antara pihak Madrasah dan pemerintah kemudian menyampaikan hasil tersebut kepada masyarakat. Itulah bentuk aplikasi peran Komite Madrasah sebagai mediator antara pemerintah dan masyarakat.

5. Peran serta masyarakat

Menurut sebagian besar masyarakat, masyarakat diundang dalam rapat di Madrasah hanya dua kali dalam setahun, yaitu pada saat pengambilan raport putra-putri mereka. Dalam rapat ini biasanya membahas tentang keadaan siswa, dan masalah pendanaan pendidikan, yang mana rapat ini dipimpin oleh

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Juki, Kepala Madrasah MTs Darul Ulum Baureno Bojonegoro, tanggal 18 Januari 2012, Pukul 10.00 WIB

pengurus Komite Madrasah. Dalam rapat ini diadakan urun rembuk antara masyarakat dengan Komite Madrasah untuk mengatasi masalah pendanaan dengan menentukan besarnya iuran untuk pendidikan. Meskipun ada dana dari pemerintah berupa dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), namun masih dibutuhkan adanya dana dari orang tua untuk penambahan sarana dan prasarana pendidikan.⁵⁰

Masyarakat bebas mengemukakan aspirasi, gagasan atau pendapat kepada Komite Madrasah tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Dan Komite Madrasah menampung aspirasi masyarakat tersebut untuk disampaikan kepada pihak Madrasah. Kemudian pihak madrasah menanggapi aspirasi masyarakat tersebut dan menjelaskan kondisi Madrasah, sehingga Madrasah dapat menerima dan melaksanakan aspirasi masyarakat yang mampu dilaksanakan atau menunda menerima aspirasi masyarakat karena belum memungkinkan untuk menerima aspirasi tersebut. Terhadap keputusan Madrasah, Komite Madrasah selalu mendukung selama keputusan itu mengarah pada kebaikan demi tercapainya tujuan pendidikan di Madrasah. Kemudian Komite Madrasah menyampaikan hasil keputusan Madrasah tersebut kepada masyarakat, supaya masyarakat mengetahui kebijakan yang diambil oleh pihak Madrasah. Menurut masyarakat, biaya pendidikan yang diambil dari orang tua siswa relatif lebih rendah dibanding biaya pendidikan di sekolah lain. Apalagi hasil lulusan dari

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak M. Syamsudin, Ketua Komite Madrasah, Tanggal 18 Januari 2012, Pukul 11.00 WIB

MTs Darul Ulum Baureno Bojonegoro ini tergolong lebih baik dari sekolah lain, karena disamping siswa mendapatkan ilmu umum, siswa juga mendapatkan ilmu agama yang sangat berguna dalam kehidupan bermasyarakat.⁵¹

Keberadaan Komite Madrasah sangat dirasakan manfaatnya bagi sebagian besar masyarakat, baik orang tua, tokoh masyarakat, maupun lingkungan sekitar. Karena masyarakat bisa lebih banyak berpartisipasi dalam dunia pendidikan dengan ikut memberikan sumbangan pemikiran kepada Madrasah. Kalau sebelum adanya Komite Madrasah masyarakat hanya mengikuti semua kebijakan Madrasah, maka kini masyarakat dapat ikut menentukan kebijakan yang diambil pihak Madrasah melalui Komite Madrasah, sehingga masyarakat tidak merasa keberatan dengan keputusan yang diambil pihak Madrasah.

Kadang saya mengikuti musyawarah disekolahan dengan banyak teman-teman orang tua wali dan guru-guru MTs, banyak sekali yang dibahas. Tentang pembangunan, pendanaan, pokoknya untuk kemajuan MTs Darul Ulum Baureno Bojonegoro, Tapi karena banyak sekali Masyarakat petani dan pedagang diisini waktunya itu yang kadang saya tidak bisa mengikuti.⁵²

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Juki, Ibid.

⁵² Wawancara dengan Bapak Sholeh, Masyarakat dan orang tua wali, Tanggal 02 Februari 2012, Pukul 10.00

D. Kendala Yang Dihadapi Komite Madrasah

Sebagai organisasi tentunya tidak lepas dari problem atau permasalahan atau kendala yang dihadapi, begitu juga dengan Komite Madrasah. Disamping itu juga perlu adanya suatu penyelesaian atau solusi untuk mengatasi kendala-kendala yang muncul tersebut. Diantara kendala yang dihadapi Komite Madrasah diantaranya adalah:

1. Terbatasnya dana yang tersedia untuk pengembangan sarana dan prasarana diantaranya: bahan ajar, sumber belajar, fasilitas pendukung dan lain-lain, karena dana pendidikan yang ada masih bersumber dari iuran pendidikan dari orang tua siswa dan dana pendidikan dari pemerintah.
2. Masih sulitnya mengumpulkan orang tua atau wali siswa dan masyarakat untuk membahas usaha meningkatkan kualitas madrasah karena tempat tinggal orang tua siswa rata-rata berjauhan satu sama lain.
3. Sulitnya mencari tenaga pendidik yang profesional karena minimnya dana untuk perekrutan tenaga kependidikan baru.
4. Sulitnya mencari donatur yang bersedia menyumbang dana karena banyaknya lembaga sejenis yang mencari dana dari donatur juga sehingga terjadi persaingan dalam mendapatkan donatur.
5. Minimnya gaji para tenaga kependidikan yang mengakibatkan kurangnya motivasi tenaga kependidikan dalam menjalankan tugasnya sehingga sulit untuk meningkatkan kualitas output/keluaran yang baik.

6. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, sehingga masyarakat kurang aktif dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul di Madrasah.⁵³

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, Komite Madrasah telah melakukan beberapa hal sebagai solusi pemecahannya. Meskipun hasilnya belum sesuai dengan yang diharapkan, namun Komite Madrasah sangat optimis bahwa suatu saat kendala-kendala tersebut dapat dikurangi dan dihilangkan.

Diantara solusi pemecahan yang telah dilakukan adalah:

1. Melakukan kontak person dengan orang tua siswa yang tempat tinggalnya masih dapat dijangkau.
2. Memberi kesempatan kepada Madrasah untuk belajar kepada mahasiswa dari perguruan tinggi yang melakukan praktek kerja di MTs Darul Ulum Baureno Bojonegoro , karena ilmu mahasiswa tentunya masih baru dan dapat digunakan untuk mengembangkan pengetahuan tenaga kependidikan yang ada di Madrasah.
4. Memperluas daerah pencarian donatur untuk dunia pendidikan.
5. Memberikan bonus atau tunjangan atau hadiah kepada tenaga kependidikan berupa THR, Pakaian dinas, Sembako dan lain-lain.
6. Memotivasi masyarakat untuk lebih peduli terhadap dunia pendidikan dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

⁵³ Wawancara dengan Bapak M. Syamsudin, Ketua Komite Madrasah MTs Darul Ulum Baureno Bojonegoro, Tanggal 18 Januari 2012, Pukul 11.00.

BAB V

PEMBAHASAN

Seperti yang telah ditetapkan pemerintah dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/U/2002, yang menerangkan bahwa peran Komite Madrasah diantaranya adalah:

- a. Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan
- b. Pendukung (supporting agency), baik yang berwujud financial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan
- c. Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan
- d. Mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan

Maka, di MTs Darul Ulum Baureno Bojonegoro peran-peran tersebut kemudian dijabarkan untuk kemudian diterapkan. Setelah Komite Madrasah dibentuk oleh pihak Madrasah kemudian Komite Madrasah berusaha menumbuhkan perhatian dan komitmen masyarakat terhadap pendidikan bermutu dengan melakukan kerjasama dengan masyarakat, kemudian menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan maupun masukan yang berasal dari masyarakat untuk dipergunakan sebagai bahan dalam memberi pertimbangan kepada Madrasah dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di MTs Darul Ulum Baureno Bojonegoro.

Dalam mengatasi masalah dana pendidikan di MTs Darul Ulum Baureno Bojonegoro. Madrasah dan Komite Madrasah berusaha untuk memperoleh dana yang berasal dari SPP, infaq, sumbangan sukarela orang tua siswa atau sumbangan dari instansi-instansi atau donatur yang peduli pendidikan.

Dukungan pemikiran yang diberikan oleh Komite Madrasah kepada Madrasah diwujudkan dengan memberi pertimbangan dalam menentukan besarnya SPP, merancang RAPBM, merencanakan program kerja, Bimbingan dan Konseling siswa, dan memecahkan masalah-masalah yang muncul berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan. Bahan pertimbangan yang diberikan Komite Madrasah berasal dari aspirasi, ide, dan tuntutan masyarakat yang telah ditampung dan diolah sedemikian rupa oleh Komite Madrasah. Dalam melakukan kontrol terhadap Madrasah, Komite Madrasah mengadakan rapat koordinasi secara intensif agar dapat mengontrol dan mengarahkan program-program yang telah direncanakan Madrasah demi tercapainya tujuan bersama antara masyarakat dan pihak Madrasah. Pertemuan ini bertujuan untuk menetapkan dan mengevaluasi program kerja Madrasah dalam penyelenggaraan pendidikan di MTs Darul Ulum Baureno Bojonegoro. Untuk berkomunikasi dengan pemerintah, baik pusat maupun daerah, dilakukan sendiri oleh pihak Madrasah karena bagaimanapun juga diantara pengurus Komite Madrasah juga terdapat beberapa pengelola Madrasah.

Sedangkan Komite Madrasah hanya menerima laporan hasil komunikasi antara pihak Madrasah dan pemerintah kemudian menyampaikan

hasil tersebut kepada masyarakat. Itulah bentuk aplikasi peran Komite Madrasah sebagai mediator antara pemerintah dan masyarakat. Keberadaan Komite Madrasah sangat dirasakan manfaatnya baik bagi orang tua, tokoh masyarakat, maupun lingkungan sekitar. Karena masyarakat bisa lebih banyak berpartisipasi dalam dunia pendidikan dengan ikut memberikan sumbangan pemikiran kepada Madrasah. Kalau sebelum adanya Komite Madrasah masyarakat hanya mengikuti semua kebijakan Madrasah, maka kini masyarakat dapat ikut menentukan kebijakan yang diambil pihak Madrasah melalui Komite Madrasah, sehingga masyarakat tidak merasa keberatan dengan keputusan yang diambil pihak Madrasah. Sebagai organisasi tentunya tidak lepas dari problem atau permasalahan atau kendala yang dihadapi, begitu juga dengan Komite Madrasah. Disamping itu juga perlu adanya suatu penyelesaian atau solusi untuk mengatasi kendala-kendala yang muncul tersebut. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, Komite Madrasah telah melakukan beberapa hal sebagai solusi pemecahannya. Meskipun hasilnya belum sesuai dengan yang diharapkan, namun Komite Madrasah sangat optimis bahwa suatu saat kendala-kendala tersebut dapat dikurangi dan dihilangkan.

A. Program Kerja Komite Sekolah Dengan Masyarakat Dalam Meningkatkan Mutu Madrasah Tsanawiyah Darul Ulum Baureno Bojonegoro.

Program kerja Komite Madrasah untuk membantu lancarnya tugas komite madrasah ada beberapa program yang sangat penting diantaranya adalah:

1. Program Umum

- a. Mengadakan kantor sekretariat beserta perlengkapannya.
- b. Mengadakan rapat pengurus komite minimal 1 (satu) bulan sekali.
- c. Bekerjasama dengan pihak-pihak luar untuk meningkatkan mutu madrasah.
- d. Sinkronisasi konsep pendidikan kepada orang tua siswa.

2. Program Khusus

a. Bidang Pendidikan

- a) Membantu pelaksanaan pelatihan-pelatihan pengembangan guru.
- b) Membantu pelaksanaan pelatihan-pelatihan pengembangan siswa.

b. Bidang Sarana dan Prasarana

- a) Pembangunan DAM dan pembelian mesin penyedot air.
- b) Pengembangan perpustakaan.
- c) Rehab kantin.

- d) Pembangunan masjid madrasah.
- e) Pehijauan lingkungan madrasah

c. Bidang Sosial

- a) Membantu pembiayaan siswa yang tidak mampu.
- b) Mengupayakan kesejahteraan bagi guru dan pegawai madrasah
Memberikan pelayanan mutu bagi orang tua siswa.

Dalam beberapa program kerja di atas, erat kaitanya untuk memajukan MTs Darul Ulum Baureno Bojonegoro. Dari segi Mutu, Bangunan, dan segi peningkatan kualitas dalam seluruh aspek.

B. Bagaimana Strategi Komite Madrasah Untuk Meningkatkan Mutu Madrasah Tsanawiyah Darul Ulum Baureno Bojonegoro.

Dalam sebuah upaya untuk mengaplikasikan transformasi konsep Komite Madrasah tentunya tidak mudah dan tidak bisa sekaligus, akan tetapi memerlukan proses bertahap dari waktu ke waktu, mulai dari tingkat menyadari perlunya fungsi Komite Madrasah serta perannya, baik kepada masyarakat maupun penyelenggara pendidikan sebagai partisipasi masyarakat yang peduli terhadap maju mundurnya sebuah pendidikan dengan kata lain dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Sebagai langkah awal adalah bagaimana Komite Madrasah menyebarluaskan strategi dan konsep-konsep pelibatan Komite

Madrasah itu sendiri kepada masyarakat dan penyelenggara pendidikan. Selanjutnya adalah bagaimana pihak penyelenggara pendidikan melakukan konsultasi kemasyarakat untuk mendapatkan masukan dalam proses menetapkan kebijakannya.

Setelah itu baru kemudian adalah adanya kerjasama dengan segenap potensi yang sudah ada dimasyarakat secara sinergis dalam bentuk saran atau masukan dengan penyelenggara pendidikan untuk memutuskan suatu kebijakan tersebut. Dan yang paling penting lagi pada tingkatan tertinggi adalah bagaimana tercapainya rasa saling memiliki, bahwa Komite Madrasah merupakan wadah pemecah sebuah masalah bersama yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan. Pada tingkat yang penting inilah, masyarakat diharapkan ikut berperan untuk memutuskan dan memecahkan sebuah persoalan-persoalan yang menyangkut dengan pendidikan tanpa adanya peran oposisi. Resiko ini menempatkan perlunya kematangan kondisi internal penyelenggara pendidikan, perubahan tatanan dalam pola berpikirnya, mengedepankan demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas, disamping prinsip lainnya yang harus dilaksanakan secara komprehensif.⁴⁵

Peneliti juga melihat bahwasanya dalam mengimplementasikan Komite Sekolah juga tidak mudah. karena itu semua banyak dilatarbelakangi kondisi

⁴⁵ Hasbullah. *Otonomi Pendidikan*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hal. 102-103

lingkungan strategis atau tidaknya karena semuanya itu juga sangat menentukan. Yakin atau tidak yakin bahwa hal ini menduduki posisi sentral karena sudah jelas barang tentu masing-masing sekolah dan daerah juga akan berbeda. Pelaksanaan Komite Madrasah seolah-olah akan berhadapan dengan identifikasi lingkungan strategis ini sebagai potensi awal untuk menuju kondisi yang diinginkan dimasa mendatang atau kedepan. Dari hasil diatas menunjukkan bahwasanya implementasi Komite Madrasah yang ada di MTs Darul Ulum Baureno Bojonegoro telah menjalankan perannya sebagai penopang kinerja sekolah dengan tanpa mengenyampingkan konsep-konsep yang sudah ada disekolah, di samping hal itu baik Komite Madrasah maupun dari pihak sekolah telah memiliki rasa saling memiliki dengan prinsip keterbukaan, demokratis, transparansi, dan akuntabilitas. Itu semua dilakukan tidak lain adalah dalam rangka untuk meningkatkan kualitas atau mutu pendidikan yang sesuai dan didambakan oleh masyarakat sekitar dan bangsa ini pada umumnya.

Adapun strategi Komite Madrasah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di MTs Darul Ulum Baureno Bojonegoro sesuai dengan batasan masalah yaitu:

1. Aspek Manajemennya.

Sampai saat ini masalah yang paling mendasar dalam sistem pendidikan nasional adalah efisiensi dalam manajemen pendidikan. Oleh karena itu berbagai ukuran efisiensi dan optimasi dalam manajemen pendidikan perlu dipantau dan dievaluasi secara terus menerus dan dalam waktu yang teratur.

Mengingat Komite Madrasah berkaitan secara langsung dengan manajemen pendidikan baik pada satuan pendidikan maupun pada daerah-daerah otonom, maka ukuran efisiensi dan efektifitas pendidikan perlu dijadikan indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja badan-badan tersebut. Dalam rangka pengembangan lembaga pendidikan dan peningkatan kualitas pendidikan hal yang perlu direfleksikan oleh para pengelola pendidikan khususnya para eksekutif antara lain (kepala sekolah, guru, tenaga administrasi, dan tenaga pelaksana) adalah sekitar fokus pelayanan masyarakat. Kalau dulu sebelum masa otonom cenderung berorientasi pada birokrasi sebagai alat birokrasi, akan tetapi sekarang dengan adanya otonomi daerah pelayanan pendidikan lebih berfokus pada (masyarakat, orang tua peserta didik, dan peserta didik itu sendiri).

Peneliti dalam pengamatannya di MTs Darul Ulum Baureno Bojonegoro telah menemukan bahwa berangkat dari sebuah perubahan dari orientasi pelayanan pendidikan tersebut yaitu dengan adanya otonomi daerah saat ini pihak pengelola pendidikan dibantu oleh Komite Madrasah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan sebuah lembaga dituntut untuk merangkul semua pihak yang terkait. Karena ketika sebuah tanggung jawab secara penuh diberikan kepada pihak pengelola pendidikan saja sudah barang tentu akan kesulitan dalam pengembangannya, maka Komite Madrasah menjembatani dengan perlu adanya pelibatan masyarakat, menciptakan

pemimpin yang kompeten untuk bersama-sama mewujudkan tujuan lembaga pendidikan tersebut:

a. Pelibatan Masyarakat.

Pihak pengelola harus bekerja secara ekstra untuk dapat melayani tuntutan masyarakat yang kompleks, maka dari itu pengelola harus merangkul masyarakat untuk masuk kedalam sistem juga untuk terlibat secara optimal dan ikut menanggung pelaksanaan pendidikan tersebut. Dan nantinya ketika berhasil itu semata-mata bukan hanya karya pengelola pendidikan saja melainkan menjadi karya kebersamaan. Dengan kata lain mati hidupnya sebuah sekolah tidak pertama-tama karena lembaganya, akan tetapi masyarakatnya juga bagaimana keterlibatannya atau tanggungjawabnya untuk rasa memilikinya lembaga pendidikan tersebut.

Pendekatan yang dikembangkan secara terus menerus oleh Komite Madrasah di MTs Darul Ulum Baureno Bojonegoro adalah pendekatan partisipatif, dimana masyarakat khususnya orang tua peserta didik diberi kesempatan secara penuh atau seluas-luasnya untuk ikut "*urun rembug*" masalah pendidikan. Mereka diberi kesempatan bersama-sama menganalisis infrastruktur yang ada disekolah, apakah itu menyangkut SDM, kurikulum, sarana dan prasarana, finansial, sistem informasi, dan semua yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan pendidikan.

Yang perlu ditekankan dalam pendekatan partisipatif ini adalah bahwa orang tua dan masyarakat merupakan hubungan konsultatif dimana proses

mereka tetap sebagai konsultan dan tidak boleh memberi komando secara mutlak akan tetapi tetap bersinergis atau berkesinambungan. Dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan keberadaan sekolah agar senantiasa *survive*, diharapkan peranan orang tua cukup peka terhadap finansial, dalam arti mengembangkan semangat solidaritas. Semangat solidaritas yang mesti dibangun adalah yang mampu diharuskan membantu yang kurang mampu, jangan sampai ada peserta didik yang gagal sekolah yang hanya disebabkan oleh ketidakmampuan orang tua dalam membiayai sekolah anaknya.

Begitu juga terhadap infrastruktur yang lain, sungguh sangat ideal jika kesadaran orang tua dan masyarakat mempunyai solidaritas sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing untuk terus menerus menghidupi sekolah dalam banyak aspek, sehingga sekolah tersebut akan terus eksis.

b. Menciptakan Pemimpin Yang Kompeten.

Pada sebuah sekolah atau lembaga pendidikan, kepala sekolah merupakan bapak sekaligus ibu bagi semua elemen yang ada dibawahnya yang bertugas di sekolah tersebut. Hal ini memberikan konsekuensi logis bahwa seorang kepala sekolah haruslah mempunyai tingkat kemampuan yang lebih sehingga dapat berkontribusi segala kebutuhan sekolah. Kondisi ini memaksa kepala sekolah untuk dapat memosisikan diri sebagaimana yang diinginkan bawahannya, meskipun kepala sekolah sendiri juga sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan, sehingga sangat naif jika tuntutan tersebut bersifat harus.

Meskipun demikian, hal itu bukan berarti berhenti sampai disitu saja. Walaupun memiliki sekian banyak kekurangan karena sifat kemanusiaannya, kepala sekolah tetap berkewajiban untuk selalu berupaya meningkatkan kemampuan diri agar dapat menjadi pemimpin yang berkompeten, sesuai yang diharapkan oleh bawahannya karena itu juga akan berpengaruh terhadap manajemen sekolah itu sendiri. Adapun hal yang perlu difahami dan upaya yang harus dilakukan agar menjadi pemimpin yang berkompeten adalah sebagai berikut:⁴⁶

- Mengatur sumber daya manusia yang ada

Seorang kepala sekolah harus mempunyai kompetensi untuk mengelola segala sumber daya manusia yang ada atau dimiliki oleh sekolah secara maksimal agar dapat mencapai tujuan sekolah. Hal ini disebabkan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah merupakan modal dasar untuk mencapai tujuan sekolah. Pada kondisi lain, sumber daya yang dimiliki oleh sekolah merupakan penentu keberhasilan untuk mencapai tujuan sekolah adapun sumber daya manusia di sekolah tidak lain adalah guru dan karyawan yang ada di sekolah.

- Memenej hubungan dengan masyarakat

Eksistensi sekolah di masyarakat sebenarnya tergantung pada bagaimana sekolah itu membina hubungan dengan masyarakat. Pada dasarnya

⁴⁶ Muhammad Saroni, *Manajemen Sekolah*, Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2006, hal. 48-51

sekolah dengan masyarakat merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan oleh apapun. Sekolah ada karena dibutuhkan oleh masyarakat dalam rangka mencerdaskan anak-anaknya. Begitu pula sebaliknya masyarakat ada untuk mengontrol dalam penyelenggaraan proses pendidikan tersebut.

Oleh sebab itu sudah menjadi kebutuhan bagi kepala sekolah untuk dapat memenej hubungan sekolah dengan masyarakat dengan sebaik-baiknya agar sistem manajemen berbasis kompetensinya juga bisa terwujud dan secara kualitas juga bisa tercapai. Dari pengamatan peneliti di MTs Darul Ulum Baureno Bojonegoro kepala sekolah sebagai pemimpin telah menjalankan tugasnya secara maksimal itu ditandai dengan sistem pengelolaan sekolah yang bagus dan adanya perhatian terhadap kesejahteraan guru dan karyawannya.

2. Aspek Sumber Daya Manusia.

Guru adalah sebuah profesi yang menuntut peleburan segala kemampuan dan waktu yang dimiliki. Oleh karena itu, tidak sembarang orang dapat menjadi guru. Memang banyak orang yang pandai, tapi tidak banyak orang yang mampu menjadi guru karena kepandaiannya itu. Bahkan, tidak jarang justru siswa menjadi bingung ketika mengikuti program pembelajarannya. Kemampuan intelektual tidaklah dapat dipakai sebagai patokan bahwa seseorang dapat menjadi guru. Kemampuan intelektual pada dasarnya adalah penguasaan atas teori-teori ilmu pengetahuan. Sementara itu, dalam sebuah proses pembelajaran yang terjadi tidak

hanya memamerkan kemampuan intelektual, akan tetapi bagaimana kita dapat mentrasfer kemampuan intelektual tersebut sehingga siswa dapat memiliki kemampuan intelektual yang dimiliki oleh guru.

Seperti yang telah disampaikan diatas bahwasanya tugas guru tidaklah mudah karena guru merupakan faktor yang penting dalam proses belajar mengajar sebab ditangan gurulah metode, kurikulum, dan alat pembelajaran lainnya akan hidup dan berperan, jadi ketika dalam lembaga pendidikan tersebut gurunya kurang profesional dan berkompeten maka secara kualitas lembaga tersebut juga tidak akan dipandang oleh masyarakat atau diragukan kualitasnya.

Setelah peneliti melihat permasalahan diatas ada beberapa hal yang perlu direnungkan dalam rangka meningkatkan peran seorang guru yaitu:

- a. Pemantapan dan peningkatan kompetensi keguruan
- b. Memegang teguh etika profesi keguruan. (Kode etik guru), seperti hasil konggres ke XIII adalah:
 1. Berbakti membimbing anak didik seutuhnya
 2. Memiliki kepemimpinan yang profesional
 3. Membina komunikasi, terutama memperoleh informasi tentang anak didik
 4. Menelusuri hubungan baik dengan orang tua murid untuk kepentingan anak didik
 5. Memelihara hubungan baik dengan masyarakat
 6. Berusaha meningkatkan mutu profesinya
 7. Memelihara hubungan antara sesama guru

8. Membina dan memelihara mutu organisasi professional
 9. Melaksanakan sesuatu yang berhubungan dengan ketata pemerintahan⁴⁷
- c. Guru berperan sebagai motivator dan dinamisator bagi peserta didik.

Disamping hal itu peneliti juga telah menemukan dilapangan bahwa strategi Komite Madrasah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di MTs Darul Ulum Baureno Bojonegoro dalam hal ini untuk meningkatkan kualitas seorang guru, karena ketika melihat bahwa tugas guru sebenarnya berat dan tidak mudah dilaksanakan sehingga perlu adanya upaya-upaya pembenahan untuk kinerja seorang guru itu sendiri. Adapun upaya-upaya yang dilakukan Komite Madrasah MTs Darul Ulum Baureno Bojonegoro dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan adalah:

1. Mengadakan Study Banding

Dengan adanya study banding ini diharapkan seorang guru dapat membandingkan apa yang belum dipunyai untuk dijadikan tolok ukur dan menilai kekurangan serta kelebihan sehingga kedepannya terpacu dan termotivasi untuk terus belajar dalam rangka meningkatkan kualitas diri untuk anak didiknya.

2. Mendelegasikan Untuk Seminar dan Pelatihan

⁴⁷ Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2004, hal. 82

Mengikuti seminar dan pelatihan merupakan bentuk upaya untuk meningkatkan kualitas guru dalam menghadapi kesulitan tugasnya sehari-hari. Tujuan dari mengikuti seminar dan pelatihan bagi guru adalah untuk mengadakan identifikasi, integrasi serta aplikasi pengetahuan, pengertian dan ketrampilan dalam proses belajar mengajar.

3. Memberikan Tips Pendidikan Ringan

Hal ini dimaksudkan untuk membantu para guru ketika mengalami kesulitan dalam menghadapi proses belajar mengajar dengan siswa karena guru merupakan suri tauladan baik tingkah laku maupun perkataan akan dicontoh oleh siswanya. Sebagai contoh yang sudah dilakukan oleh pengurus Komite Madrasah adalah memberikan kursus kepribadian.

Dari hasil pengamatan diatas bisa disimpulkan bahwasanya Komite Madrasah telah mengupayakan bagaimana meningkatkan peran guru dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan meskipun kurang maksimal pihak sekolah sudah merasa sangat terbantu dengan adanya Komite Madrasah sebagai partner kerja yang baik.

4. Aspek Pengembangan Kurikulum.

Kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan memberi peluang bagi kepala sekolah, guru, dan peserta didik untuk melakukan inovasi dan improvisasi disekolah, yang berkaitan dengan masalah kurikulum dan pembelajaran yang tumbuh dari aktivitas, kreatifitas, dan profesionalisme yang dimiliki sekolah. Pengembangan kurikulum dan pembelajaran merupakan salah

satu aspek pendidikan yang dalam manajemen berbasis madrasah pengembangannya dilimpahkan kepada daerah dan sekolah, tentu saja bagi daerah dan sekolah yang sudah mapan, memiliki kemauan, dan kemampuan untuk mengembangkan kurikulum sendiri, sesuai dengan kebutuhan masyarakat lingkungan sekitar. Pemberian otonomi luas kepada sekolah dalam mengembangkan kurikulum dan pembelajaran beserta sistem evaluasinya harus menjadi kepedulian pemerintah dalam merespon gejala-gejala yang muncul di masyarakat dan upaya peningkatan kualitas pendidikan secara umum. Pemberian otonomi ini menuntut pendekatan manajemen yang lebih kondusif disekolah agar dapat mengakomodasi seluruh keinginan sekaligus memberdayakan berbagai komponen masyarakat secara efektif, guna mendukung kemajuan pendidikan dan sistem yang ada di sekolah.

Dalam konteks otonomi daerah, kurikulum adalah suatu lembaga pendidikan tidak sekedar daftar mata pelajaran yang dituntut dalam suatu jenis dan jenjang pendidikan. Dalam pengertian yang luas, kurikulum berisi kondisi yang telah melahirkan suatu rencana atau program pelajaran tertentu serta berkenaan dengan proses yang terjadi didalam lembaga.

Dari permasalahan diatas MTs Darul Ulum Baureno Bojonegoro dibantu Komite Madrasah dalam mengimplementasikan kurikulum ini yang jelas mempunyai strategi tersendiri dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di MTs Darul Ulum Baureno Bojonegoro, dalam hal ini wakaer kurikulum dibantu Komite Madrasah, berdasarkan pengamatan peneliti mereka mempunyai

tanggungjawab yang penuh dan bersemangat berlomba-lomba untuk mewujudkannya demi tercapai tujuan lembaga dan meningkatkan kualitas semua elemen yang ada disekolah.

Disamping menggali potensi peserta didik disekolah Komite Madrasah secara kultural juga berupaya menjembatani bagaimana peserta didik ketika sudah berada dirumah, karena pihak sekolah tidak terus memantau setelah peserta didik berada dirumah. Untuk itu Komite Madrasah disini sangat berperan untuk selalu menghimbau pada wali murid untuk terus melakukan pendampingan dan bimbingan dalam mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari apa yang telah didapat dari sekolah, semua itu dilakukan agar ada keseimbangan antara disekolah dan dirumah serta untuk mencapai sebuah tujuan yaitu meningkatkan kualitas pendidikan.

4. Aspek Sarana dan Prasarana.

Masalah sarana dan prasana maka persoalan yang akan muncul adalah persoalan dana mungkin dana dirasa merupakan persoalan yang paling krusial dalam perbaikan dan pembangunan sistem pendidikan. Dan dana juga merupakan salah satu syarat atau unsur yang sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan. Mungkin selama ini banyak dikeluhkan bahwa kualitas atau mutu pendidikan nasional sangat rendah karena dana yang tidak mencukupi, anggaran untuk pendidikan masih terlalu rendah. Padahal kalau kita mau belajar dari bangsa-bangsa yang maju bagaimana mereka membangun yaitu

dengan cara berani menempatkan anggaran untuk pembiayaan pendidikan melebihi keperluan-keperluan lain.

UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional sebenarnya sudah mengamanatkan tentang pentingnya alokasi anggaran dana untuk pembiayaan dan pembangunan pendidikan ini. Sayangnya amanat yang jelas-jelas memiliki dasar dan payung hukum tersebut dengan berbagai dalih dan alasan sampai saat ini masih belum bisa dilaksanakan. Sementara di daerah baik para eksekutif maupun legislatif masih sibuk berdebat saja, sehingga menimbulkan kesan bahwa pendidikan merupakan bagian dari pembangunan yang belum diprioritaskan. Adapun dana masyarakat yang selama ini digunakan untuk membiayai pendidikan belum optimal teralokasikan secara proporsional sesuai dengan kemampuan daerah. Terserapnya dana masyarakat ke pusat membuat daerah terjadi semakin tidak berdaya membiayai penyelenggaraan pendidikan. Sarana dan prasana pendidikan sangat tergantung pengadaannya dari pemerintah pusat.

Dalam perjalanan proses belajar mengajar memang tidak terlepas oleh sebuah dana, artinya sebagai penunjang lembaga pendidikan dan proses belajar mengajar tersebut dibutuhkan fasilitas yang memadai semua itu diharapkan supaya siswa tersebut tidak hanya mampu dalam hal teori saja melainkan dalam tataran praktiknya juga menguasai. Berangkat dari permasalahan diatas Komite Sekoah bekerja sama dengan pihak sekolah dalam rangka pengembangan dan untuk meningkatkan kualitas pendidikan terus berupaya memaksimalkan dana yang

berasal dari infaq wali murid jadi tidak bergantung pada instansi pemerintah, karena MTs Darul Ulum Baureno Bojonegoro juga menyadari bahwa sekolahnya adalah swasta. Untuk itu Komite Madrasah selalu menghimbau dan menanamkan kepada wali murid agar mempunyai rasa saling memiliki terhadap lembaga pendidikan dimana putra putrinya itu sekolah.

Dari upaya-upaya yang dilakukan oleh Komite Madrasah di MTs Darul Ulum Baureno Bojonegoro sedikit banyak telah membantu pihak sekolah yang itu terbukti fasilitas-fasilitas yang ada saat ini seperti internet, computer, mikroskop, serta pembangunan gedung yang semula terbuat dari bambu tapi sekarang sudah berubah menjadi enak dipandang, semua itu dimaksudkan agar proses pembelajaran bisa kondusif dan efisien serta dalam rangka meningkatkan kualitas atau mutu pendidikan.

C. Implementasi Program Kerja Dan Peran Masyarakat Selama Ini Dalam Pengembangan Madrasah Tsanawiyah Darul Ulum Baureno Bojonegoro .

Peran Serta Masyarakat (PSM) yang terdiri dari orang tua, anggota keluarga, tokoh masyarakat, para pengusaha, profesional pendidikan, profesional medis, dan *stakeholder* perlu digalakkan dan ditumbuhkan dan dikembangkan secara optimal agar implementasi dan peran Komite Madrasah dapat berlangsung dengan baik seperti yang diharapkan oleh masyarakat pendidikan dan negara.

Selama ini peran komite madrasah disambut sangat antusias oleh masyarakat. Karena dengan adanya komite madrasah ini sangat membantu dalam

pengembangan MTs Darul Ulum dalam segala lini. Komite madrasah beserta masyarakat bekerja sama untuk mengembangkan pendidikan yang ada di lembaga. Sejak adanya komite madrasah masyarakat beserta komite madrasah saling membantu dalam pelaksanaan kegiatan dan pertemuan yang diadakan, tetapi karena keadaan yang kurang memungkinkan, yaitu masyarakat sekitar yang mayoritas adalah petani, untuk mengkondisikan semua kegiatan untuk berjalan maksimal itu agak sulit. Oleh karena itu komite madrasah dan semua pihak harus memiliki strategi agar semua pelaksanaan kegiatan bisa maksimal sesuai yang diinginkan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Program Kerja Komite Sekolah Dengan Masyarakat Dalam Meningkatkan Mutu Madrasah Tsanawiyah Darul Ulum Baureno Bojonegoro.

1. Program Umum

- a. Mengadakan kantor sekretariat beserta perlengkapannya.
- b. Mengadakan rapat pengurus komite minimal 1 (satu) bulan sekali.
- c. Bekerjasama dengan pihak-pihak luar untuk meningkatkan mutu madrasah.
- d. Sinkronisasi konsep pendidikan kepada orang tua siswa.

2. Program Khusus

- a. Bidang Pendidikan

- a) Membantu pelaksanaan pelatihan-pelatihan pengembangan guru.
- b) Membantu pelaksanaan pelatihan-pelatihan pengembangan siswa.

- b. Bidang Sarana dan Prasarana

- a) Pembangunan DAM dan pembelian mesin penyedot air.
- b) Pengembangan perpustakaan.
- c) Rehab kantin.
- d) Pembangunan masjid madrasah.
- e) Pehijauan lingkungan madrasah

c. Bidang Sosial

- a) Membantu pembiayaan siswa yang tidak mampu.
- b) Mengupayakan kesejahteraan bagi guru dan pegawai mad-rasah
Memberikan pelayanan mutu bagi orang tua siswa.

Dalam beberapa program kerja di atas, erat kaitanya untuk memajukan MTs Darul Ulum Baureno Bojonegoro. Dari segi Mutu, Bangunan, dan segi peningkatan kualitas dalam seluruh aspek.

2. Bagaimana Strategi Komite Madrasah Untuk Meningkatkan Mutu Madrasah Tsanawiyah Darul Ulum Baureno Bojonegoro.

Adapun strategi Komite Madrasah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di MTs Darul Ulum Baureno Bojonegoro sesuai dengan batasan masalah yaitu:

1. Aspek Manajemennya.
2. Aspek Sumber Daya Manusia.

3. Aspek Pengembangan Kurikulum.
4. Aspek Sarana dan Prasarana.
3. Implementasi Program Kerja Dan Peran Masyarakat Selama Ini Dalam Pengembangan Madrasah Tsanawiyah Darul Ulum Baureno Bojonegoro .

Peran Serta Masyarakat (PSM) yang terdiri dari orang tua, anggota keluarga, tokoh masyarakat, para pengusaha, profesional pendidikan, profesional medis, dan *stakeholder* perlu digalakkan dan ditumbuhkan dan dikembangkan secara optimal agar implementasi dan peran Komite Madrasah dapat berlangsung dengan baik seperti yang diharapkan oleh masyarakat pendidikan dan negara.

Selama ini peran komite madrasah disambut sangat antusias oleh masyarakat. Karena dengan adanya komite madrasah ini sangat membantu dalam pengembangan MTs Darul Ulum dalam segala lini. Komite madrasah beserta masyarakat bekerja sama untuk mengembangkan pendidikan yang ada di lembaga. Sejak adanya komite madrasah masyarakat beserta komite madrasah saling membantu dalam pelaksanaan kegiatan dan pertemuan yang diadakan, tetapi karena keadaan yang kurang memungkinkan, yaitu masyarakat sekitar yang mayoritas adalah petani, untuk mengkondisikan semua kegiatan untuk berjalan maksimal itu agak sulit. Oleh karena itu komite madrasah dan semua pihak harus memiliki strategi agar semua pelaksanaan kegiatan bisa maksimal sesuai yang diinginkan.

B. Saran

Dari hasil penelitian mengenai peran Komite Madrasah, maka dapat disarankan bahwa:

1. Bagi Komite Madrasah

Komite Madrasah lebih memperhatikan permasalahan yang muncul di lingkungan Madrasah sehingga permasalahan tersebut segera dicarikan solusinya

2. Bagi Madrasah

Selalu menjalin kerjasama yang baik dengan masyarakat sehingga masyarakat merasa ikut bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pendidikan

3. Bagi orangtua siswa

Hendaknya orangtua selalu berperan aktif dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan menjalin hubungan yang baik dengan madrasah, karena madrasah memerlukan masukan dari orangtua dalam menyusun program pendidikan, sekaligus memerlukan dukungan dalam melaksanakan program-program tersebut.

Demikianlah beberapa saran dari penulis diharapkan bisa menjadi masukan dan akan menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan komite Madrasah.

DAFTAR PUSTAKA

- Umar, Husaini. 2008. *Manajemen: teori, praktik, dan riset pendidikan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sagala, Syaiful. 2008. *Administrasi pendidikan kontemporer*. Bandung. CV: Alfabeta
- Mulyasa, E. 2003. *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- (QS. Al-Maidah: 3)
- Purwanto, Ngalim. 2004. *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Wahdjosumidjo. 1999. *Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Jakarta: Remaja Grafindo Persada
- Adnan, Hamdan. Cengara, Hafid. 1996. *Prinsip-prinsip Hubungan Masyarakat*. Surabaya: Usaha Nasional
- Hasbullah, 2003. *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Pidarta, Made, 1988. *Manajemen Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara,
- Irawan Ade, dkk. 2004. *Mendagangkan Sekolah*. Jakarta: Indonesia Corruption watch
- Tim Pengembangan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, "*Indikator Kinerja Dewan Pendidikan dan Komite sekolah*", <http://www.DepDikNas.go.id/serba-serbi/dpks/kinerja>, (diakses pada: Jumat 19 januari 2012)
- Hasbullah. 2006. *Otonomi Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Umar, Husein. 2003. *Riset Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Arikunto, Suharsimi. 1993. *Prosedur Penelitian (Suatu pendekatan praktek)*. Yogyakarta: Rineka Cipta

- Mendiknas. 2002. *Lampiran II SK No. 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah*. Jakarta: Cemerlang.
- Mendiknas. 2003. *UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS*. Jakarta: Cemerlang.
- Mulyasa, E. 2002. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2003. *Menjadi Kepala Sekolah Profesional Dalam Konteks Menyukseskan MBS dan KBK*. Bandung: Remaja Rosda Karya.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS TARBIYAH

Jalan Gajayana Nomor 50 Telepon (0341) 552398 Faksimile (0341) 552398
Website: www.tarbiyah.uin-malang.co.id

Nomor : Un. 3.1/TL.001/251/2012
Lampiran : 1 berkas Proposal Skripsi Penelitian
Perihal : **Penelitian Skripsi**

28 November 2011

Kepada:
Yth. Kepala Madrasah Tsanawiyah Darul Ulum
di-
Bojonegoro

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami mengharap agar mahasiswa di bawah ini:

Nama : Miftahul Arief Rahman
NIM : 08110217
Fakultas/Jurusan : Tarbiyah/Pendidikan Agama Islam
Semester : Genap, 2011/2012
Judul Skripsi : **"Peran Komite Madrasah Dalam Pengembangan
Madrasah Tsanawiyah Darul Ulum Baureno
Bojonegoro"**

dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/menyusun skripsi, yang bersangkutan mohon diberikan izin/kesempatan untuk mengadakan penelitian di lembaga/instansi yang menjadi wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasama Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Dr. H. M. Zainuddin, MA
NIP. 19620507 199503 1 001

Tembusan Yth:

1. Kajur PAI
2. Arsip



Certificate No. ID08/1219



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS TARBIYAH

Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

Bukti Konsultasi

Nama Mahasiswa : Miftahul Arief Rahman
NIM : 08110217
Pembimbing : Dr. H. M. Mujab, M. A
Judul Skripsi : **PERAN KOMITE MADRASAH DALAM PENGEMBANGAN
MADRASAH TSANAWIYAH DARUL ULUM BAURENO BOJONEGORO**

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	28 Juli 2011	Konsultasi Proposal	
2	11 agustus 2011	Konsultasi Proposal bab I-III	
3	18 agustus 2011	Acc Proposal	
4	31 oktober 2011	Revisi Proposal	
5	13 Februari 2012	Konsultasi bab I-IV	
6	15 Maret 2012	Acc bab I-IV	
7	19 Maret 2012	Konsultasi bab I-VI	
8	27 Maret 2012	Acc Skripsi	

Malang, 27 Maret 2012

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Tarbiyah**

**Dr. H. Zainuddin, M.A
NIP. 1962050719995031001**

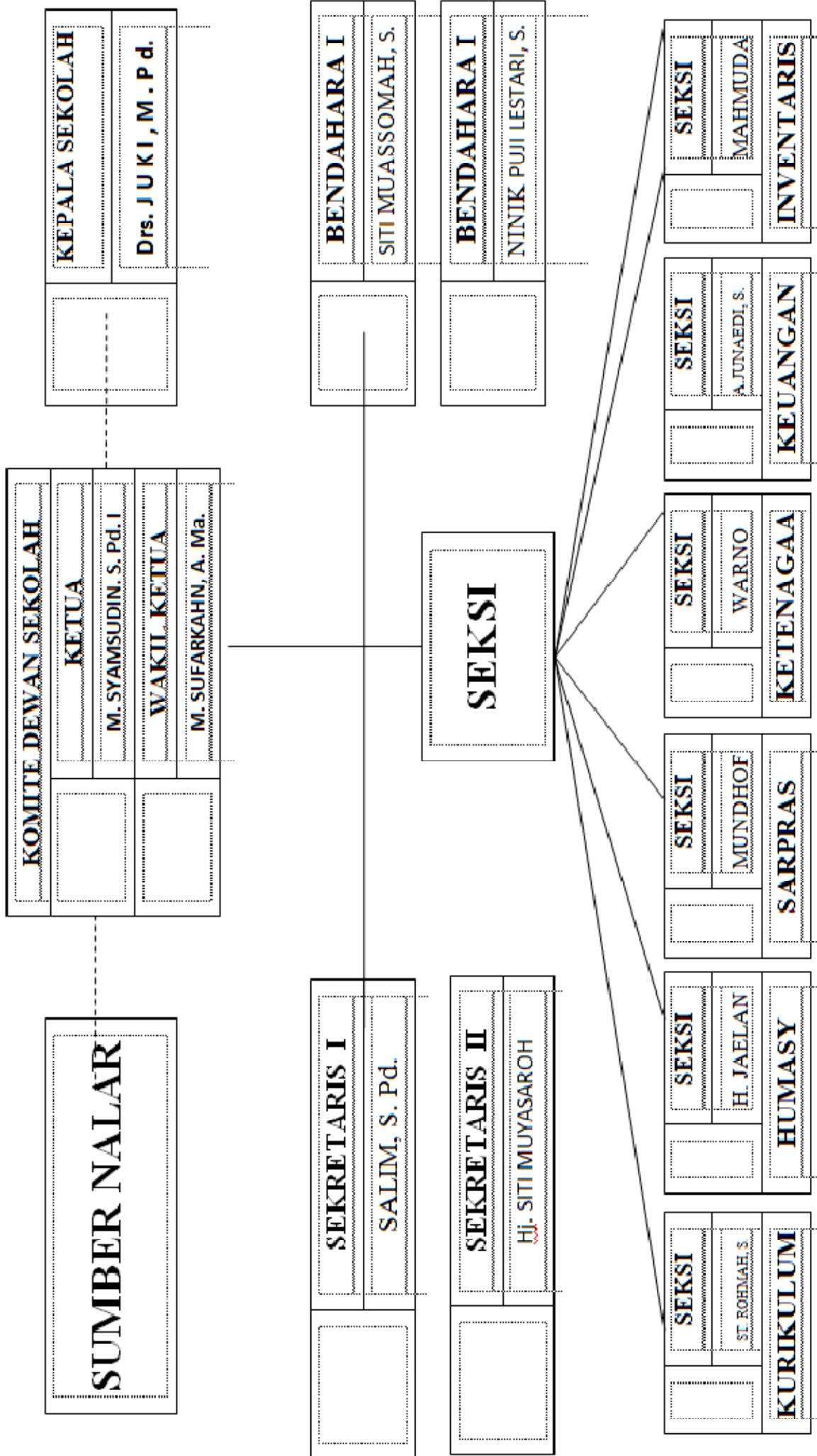
PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara dengan Kepala Madrasah, Guru, Serta Komite madrasah dan masyarakat MTs Darul Ulum

Baureno Bojonegoro :

1. Bagaimana bentuk kerjasama antara Komite Madrasah dengan Masyarakat?
2. Bagaimana sejarah berdirinya komite madrasah yang ada di MTs Darul Ulum?
3. Apa program kerja Komite madrasah untuk memajukan Madrasah?
4. Strategi seperti apakah yang sudah dijalankan oleh komite madrasah?
5. Seperti apakah kepengurusan Komite Madrasah yang ada di MTs Darul Ulum?
6. Langkah-langkah apa saja yang sudah ditempuh oleh komite madrasah untuk mengembangkan madrasah darul ulum baureno bojonegoro?
7. Sejarah dari madrasah darul ulum baureno bojonegoro?
8. Struktur organisasi madrasah darul ulum baureno bojonegoro?
9. Struktur komite madrasah?
10. Kendala yang dihadapi oleh komite madrasah beserta solusi yang telah ditempuh?
11. Bagaiman tanggapan masyarakat mengenai komite madrasah?
12. Bagaimana pandangan guru madrasah terhadap komite madrasah saat ini?

**STRUKTUR ORGANISASI KOMITE SEKOLAH
MTs DARUL ULUM NGLUMBER
2011/2012**



Lampiran 6

1. Program Umum

- a. Mengadakan kantor sekretariat beserta perlengkapannya.
- b. Mengadakan rapat pengurus komite minimal 1 (satu) bulan sekali.
- c. Bekerjasama dengan pihak-pihak luar untuk meningkatkan mutu madrasah.
- d. Sinkronisasi konsep pendidikan kepada orang tua siswa.

2. Program Khusus

a. Bidang Pendidikan

- a) Membantu pelaksanaan pelatihan-pelatihan pengembangan guru.
- b) Membantu pelaksanaan pelatihan-pelatihan pengembangan siswa.

b. Bidang Sarana dan Prasarana

- a) Pembangunan DAM dan pembelian mesin penyedot air.
- b) Pengembangan perpustakaan.
- c) Rehab kantin.
- d) Pembangunan masjid madrasah.
- e) Paghijauan lingkungan madrasah

c. Bidang Sosial

- a) Membantu pembiayaan siswa yang tidak mampu.
- b) Mengupayakan kesejahteraan bagi guru dan pegawai madrasah Memberikan pelayanan mutu bagi orang tua siswa.



AD dan ART Komite

ANGGARAN DASAR

PEMBUKAAN

Pada dasarnya pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah, orang tua, dan masyarakat. Oleh karena itu upaya untuk memajukan madrasah sudah seharusnya melibatkan ketiga unsur tersebut.

BAB I

Nama, Waktu, dan Kedudukan

Pasal 1

1. Organisasi ini bernama Komite Madrasah MTs Darul Ulum Baureno Bojonegoro, selanjutnya disebut dengan Komite Madrasah.
2. Komite Madrasah ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
3. Komite Madrasah/Majelis ini berkedudukan di MTs Darul Ulum Baureno Bojonegoro.

BAB II

Dasar

Pasal 2

Komite Madrasah berdasar Pancasila, UUD 1945 dan amandemennya, Undang-Undang No. 20/2003, UU No. 22 Tahun 1999, UU No. 25 Tahun 2000, dan Peraturan Daerah.

BAB III

Jati Diri

Pasal 3

Komite Madrasah merupakan lembaga independen yang mempunyai visi dan misi terciptanya masyarakat masa depan yang berkualitas melalui kerjasama yang erat dengan madrasah yang berakar pada nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan.

BAB IV

Sifat

Pasal 4

Komite Madrasah bersifat:

1. Independen, dilandasi dengan prinsip-prinsip kemandirian organisasi dengan etika tata hubungan kerjasama dengan berbagai pihak yang mengarah kepada tujuan perbaikan kualitas pendidikan di madrasah.
2. Tidak terkait kepada kepentingan dan keuntungan baik pribadi mau-pun golongan seperti partai politik, mazhab keagamaan, dan sebagai-nya.

BAB V

Kedaulatan

Pasal 5

Kedaulatan organisasi berada di tangan anggota dan dilaksanakan sepe-nuhnya melalui rapat anggota komite madrasah.

BAB VI

Tujuan

Pasal 6

1. Mewadahi dan meningkatkan partisipasi para *stakeholder* madrasah pada tingkat madrasah untuk turut serta merumuskan, menetapkan, melaksanakan dan memonitor pelaksanaan kebijakan madrasah dan pertanggungjawaban yang terfokus pada kualitas pelayanan peserta didik secara proporsional dan terbuka.
2. Mewadahi partisipasi para *stakeholder* madrasah untuk turut serta dalam manajemen madrasah sesuai dengan peran dan fungsinya, berkenaan dengan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program madrasah secara proporsional.
3. Mewadahi partisipasi baik individu maupun kelompok suka-rela (*avolunteer*), pemerhati atau pakar pendidikan yang peduli kepada kualitas pendidikan secara proporsional dan profesional selaras dengan kebutuhan madrasah.
4. Menjembatani dan turut serta memasyarakat kebijakan madrasah kepada pihak-pihak yang mempunyai keterkaitan dan kewenangan di tingkat daerah.

BAB VII

Peran

Pasal 7

Komite Madrasah berperan sebagai:

1. Pemberi pertimbangan (*advisor agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.
2. Pendukung (*supporting agency*) baik yang berwujud finansial, pemi-kiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
3. Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akun-tabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan melalui mekanisme musyawarah.
4. Mediator antara pemerintah (*executive*) dengan masyarakat di satuan pendidikan.

BAB VIII

Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran

Pasal 8

Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Komite Madrasah hanya dapat dilakukan melalui musyawarah anggota yang dihadiri oleh sekurang-sekurang setengah plus 1 dari jumlah anggota komite yang di-undang dan disetujui oleh setengah plus satu dari anggota komite yang hadir yang hadir.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

KOMITE MTS DARUL ULUM BAURENO BOJONEGORO

BAB I

PEMBENTUKAN

Pasal 1

1. Komite MTs Darul Ulum Baureno Bojonegoro dibentuk berdasarkan musyawarah yang di dalamnya sekurang-kurangnya terdiri dari unsur-unsur:
 - a. Perwakilan Dewan Guru
 - b. Orang tua/wali murid
 - c. Tokoh Masyarakat
 - d. Tokoh Pendidikan
 - e. Pengusaha
 - f. Aktivis Organisasi Pendidikan
 - g. Perwakilan Alumni

BAB II

PENGURUS KOMITE

Pasal 2

1. Pengurus Komite Madrasah terdiri dari:
 - a. Seorang ketua
 - b. Seorang sekretaris
 - c. Seorang bendahara
 - d. Beberapa orang yang menempati bidang sesuai dengan kebutuhan.
2. Jika dipandang perlu seorang ketua dibantu oleh wakil ketua, sekretaris dibantu oleh wakil sekretaris, dan bendahara dibantu oleh wakil bendahara.
3. Struktur komite madrasah ditetapkan oleh forum musyawarah yang diwakili oleh ketua dan sekretaris sidang.
4. Masa jabatan Komite Madrasah adalah 2 tahun.
5. Pengurus Komite Madrasah yang sudah habis masa jabatannya bisa menjabat kembali jika dipilih oleh peserta musyawarah hanya untuk satu periode berikutnya.
6. Pengurus Komite yang melakukan pelanggaran AD/ART bisa diberhentikan menjadi pengurus komite melalui musyawarah komite.

BAB III

MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 3

- a. Musyawarah komite/majelis merupakan forum tertinggi organisasi dilaksanakan dua tahun sekali.
- b. Agenda Musyawarah Komite adalah:
 1. Laporan pertanggungjawaban komite
 2. Penyusunan program kerja
 3. Penyusunan kebijakan
 4. Pemilihan struktur pengurus komite berikutnya
- c. Musyawarah Komite dihadiri oleh pengurus komite madrasah ditambah dengan pimpinan satuan pendidikan (kepala madrasah) dan tamu undangan jika dipandang perlu.
- d. Pengurus komite yang telah menerima surat undangan dan tidak dapat menghadiri musyawarah dinyatakan menyetujui seluruh keputusan musyawarah.

Pasal 4

- a. Rapat-rapat terdiri dari:
 - 1) Rapat Kerja
 - 2) Rapat Pleno
 - 3) Rapat Pimpinan Harian

4) Rapat Pimpinan

- b. Rapat Kerja Komite dihadiri oleh pengurus komite madrasah dan oleh kepala madrasah.
- c. Rapat Pleno, Rapat Pimpinan, dan Rapat Pimpinan Harian dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.
- d. Pengurus komite yang telah menerima surat undangan dan tidak dapat menghadiri rapat maka dinyatakan menyetujui seluruh keputusan rapat.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

Komite Madrasah mempunyai tugas dan fungsi:

1. Menyelenggarakan rapat-rapat komite sesuai dengan program yang ditetapkan.
2. Bersama-sama dengan madrasah merumuskan dan menetapkan visi dan misi madrasah.
3. Bersama-sama dengan madrasah merumuskan standar pelayanan pembelajaran di madrasah.
4. Bersama-sama dengan madrasah menyusun rencana strategis pengembangan madrasah.
 - a. Bersama-sama dengan madrasah menyusun dan menetapkan rencana program madrasah tahunan termasuk RAPBM.
5. Membahas dan turut serta menetapkan pemberian tambahan kesejahteraan berupa uang honorarium yang diperoleh dari masyarakat kepada kepala madrasah, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan madrasah.
6. Bersama-sama dengan madrasah mengembangkan potensi ke arah prestasi unggulan, baik yang bersifat akademis (nilai tes harian, ulangan semester, dan UN), maupun yang bersifat non-akademik (keagamaanm olah raga, seni dan atau keterampilan, pertanian, ketajinan tangan, dan teknologi sederhana).
7. Menghimpun dan menggali sumber dana dari masyarakat untuk meningkatkan kualitas pelayanan madrasah.
8. Mengelola kontribusi masyarakat berupa uang yang diberikan kepada madrasah.
9. Mengelola kontribusi masyarakat berupa nonmateri (tenaga, pikiran) yang diberikan kepada madrasah.

10. Mengevaluasi program madrasah secara proporsional sesuai dengan kesepakatan dengan pihak madrasah, meliputi: pengawasan penggunaan sarana dan prasarana madrasah, pengawasan keuangan secara berkala dan berkesinambungan
11. Mengidentifikasi berbagai permasalahan dan memecahkannya ber-sama-sama dengan pihak madrasah.
12. Memberikan respons terhadap kurikulum yang dikembangkan secara terstandar nasional maupun lokal.
13. Memberikan motivasi, penghargaan (baik berupa materi maupun nonmateri) kepada tenaga kependidikan atau kepada seseorang yang berjasa kepada madrasah secara proporsional sesuai dengan kaidah profesional pendidik atau tenaga kependidikan madrasah.
14. Memberikan otonomi profesional kepada pendidikan mata pelajaran dalam melaksanakan tugas-tugas kependidikannya sesuai dengan kaidah dan kompetensi guru.
15. Membangun jaringan kerjasama dengan pihak luar madrasah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan proses dan hasil pendidikan.
16. Memantau kualitas proses pelayanan dan hasil pendidikan di madrasah
17. Mengkaji laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program yang dikonsultasikan oleh kepala madrasah.
18. Menyampaikan usul atau rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan madrasah.

BAB V

KODE ETIK

Pasal 5

1. Mendukung program-program peningkatan mutu madrasah
2. Tidak mencemarkan nama baik komite, pimpinan madrasah, dan lembaga pendidikan (madrasah)

BAB VI

KERJASAMA

Pasal 6

1. Komite dapat melaksanakan kerjasama dengan pihak-pihak luar untuk memajukan kualitas pendidikan madrasah
2. Penentuan kerjasama dengan pihak-pihak luar harus berdasarkan kesepakatan pengurus komite melalui rapat komite

BAB VII

KEUANGAN DAN PERBENDAHARAAN

Pasal 7

Keuangan bersumber dari usaha komite yang halal dan tidak mengikat

BAB VIII

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 8

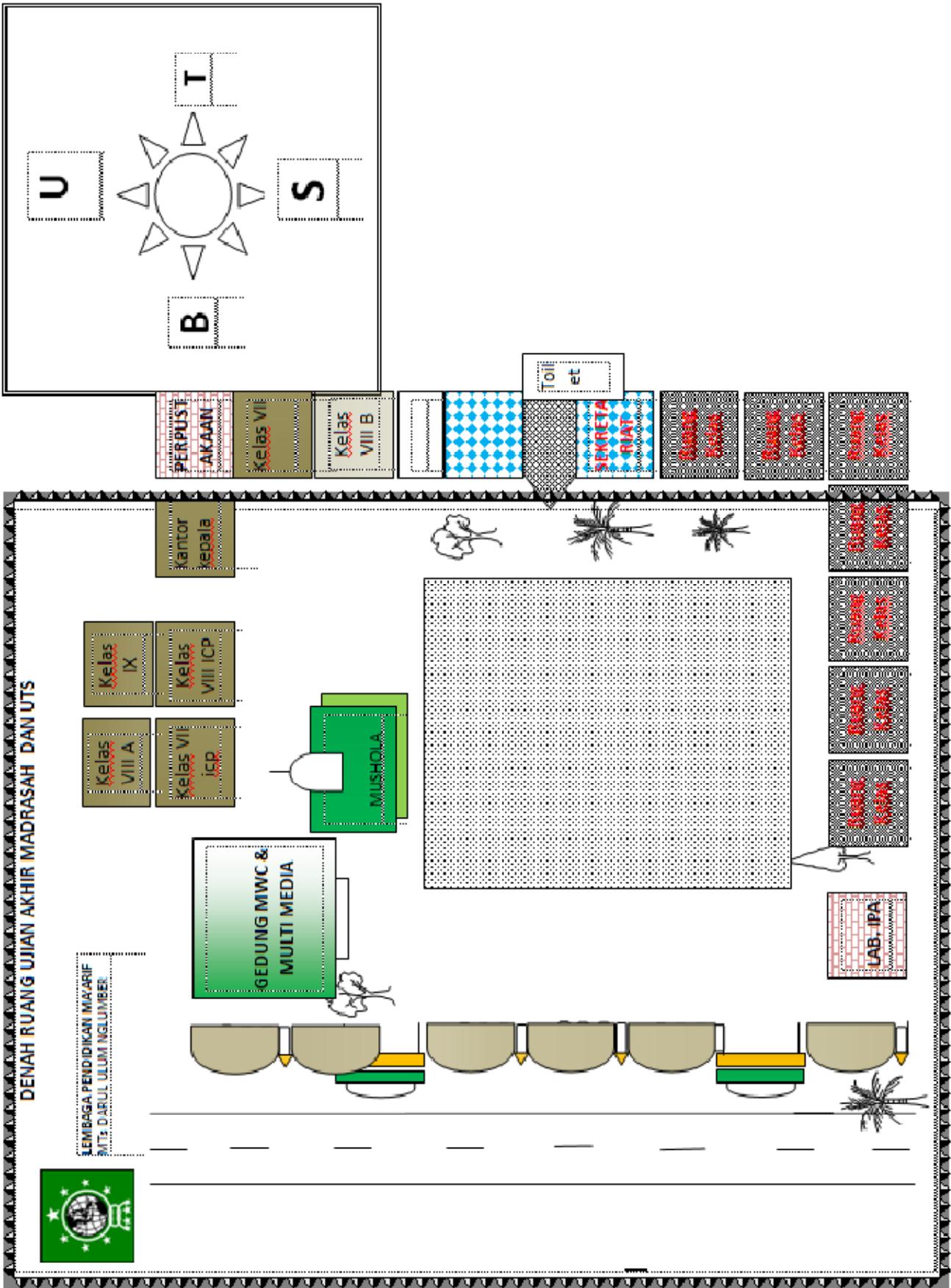
Perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan berdasarkan Keputusan Musyawarah Komite dan disetujui yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya separuh lebih satu dari jumlah peserta yang diundang dan disetujui oleh sekurang-kurang oleh separuh lebih satu dari jumlah pe-serta yang hadir.

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan ditetapkan kemudian melalui rapat-rapat komite.

Pasal 10

Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



BIODATA MAHASISWA

Nama	:	MIFTAHUL ARIEF RAHMAN
NIM	:	08110217
Tempat, Tanggal Lahir	:	Bojonegoro, 11 April 1990
Fak./Jur./Prog. Studi	:	Tarbiyah/PAI/PAI
Tahun Masuk	:	2008
Alamat Rumah	:	Dusun Kepel RT/RW: 009/004, Desa Kepel, Kec. Kalitidu, Kab. Bojonegoro
Aamat di Malang	:	Jl. Terusan Surabaya No. 000 Malang
No Tlpn Rumah/HP	:	085755102411
Riwayat Pendidikan	:	<ol style="list-style-type: none">1. Sekolah Dasar SDN Kalitidu 1, Bojonegoro (1996-2002)2. Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Bojonegoro (2002-2005)3. Madrasah Aliyah Negeri 1 Bojonegoro (2005-2008)4. Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang (2008-2012)

Malang, 26 Maret 2012
Mahasiswa

Miftahul Arief Rahman
NIM. 08110217